

**ANALISIS
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1995-2008**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Univesitas Diponegoro

Disusun oleh :

**YUKI ANGELIA
NIM.C2B006073**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yuki Angelia
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1995-2008**
Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, SE., MSi

Semarang, 17 September 2010

Dosen Pembimbing,



(Banutul Hayati, SE., MSi)

NIP. 19680316 199802 2001


PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Yuki Angelia
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 1995-2008**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 September 2010

Tim Penguji :

1. Banatul Hayati, SE., MSi
2. Drs. Nugroho SBM, MT.
3. Drs. Y Bagio Mudakir, MSp.


(.....)
(.....)
(.....)


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yuki Angelia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1995-2008**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 September 2010

Yang membuat pernyataan,



(Yuki Angelia)

NIM : C2B006073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui ”

(Q.S Al-Ankabut: 64)

“ Ada dua cara menjalani kehidupan. Pertama, seolah seperti tidak ada yang ajaib;
Kedua, seolah seperti semuanya ajaib”

(Albert Einstein)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Mama, Papa, Adik serta keluargaku yang telah memberikan motivasi, semangat, bantuan dan do'a.
- Teman-teman serta pihak yang telah membantu hingga tersusunya skripsi ini.

ABSTRACT

Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially in developing countries. DKI Jakarta has a high level of inequality compared to other provinces in Indonesia. This study aimed to calculate the level of inequality in the area of DKI Jakarta Province, proving Kuznets hypothesis, and to analyze the influence of independent variables GDRP per capita, investment, agglomeration, and dummy fiscal decentralization on regional development disparities in the Province of DKI Jakarta in the period 1995 to 2008.

This study uses secondary data consists of data coherent with the time from 1995 until 2008 which was obtained from Badan Pusat Statistik Jakarta (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). This research method are analysis descriptive statistics and regression analysis.

The research concludes that by using GDRP per capita relative levels of inequality in the province of DKI Jakarta during the period of 1995-2008 was still high and the Kuznets hypothesis is proven in this region.

Based on the results of the regression, GDRP per capita and agglomeration has a positive and significant at $\alpha = 5\%$, the investment variables have negative and significant at $\alpha = 5\%$ of regional development disparities in DKI Jakarta. Dummy variable of fiscal decentralization have negative and not significant. Calculated F value is 12.33849 with a probability 0.001068 smaller than $\alpha = 5\%$, thus concluded that the four independent variables are GDRP per capita, investment, agglomeration, and dummy of fiscal decentralization jointly influence the regional development disparities in the Province Jakarta. R^2 value 0.845769, 84,58% variation signifies that the regional development disparities in the Province of DKI Jakarta can be explained from the variation into four independent variables.

Keywords: Regional Development Disparities, Kuznets Hypothesis, GDRP per capita, Investment, Agglomeration, and Fiscal Decentralization

ABSTRAK

Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang. DKI Jakarta memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, membuktikan Hipotesis Kuznets, serta menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 1995 sampai dengan 2008 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 1995-2008 masih tinggi. Sedangkan Hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini.

Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB per kapita dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5 \%$, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 5 \%$ terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan variabel dummy desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai F hitung sebesar 12,33849 dengan probabilitas 0.001068 lebih kecil dari $\alpha = 5 \%$, sehingga disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Nilai R^2 sebesar 0,845769 menandai bahwa 84,58% variasi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan dari variasi ke empat variabel independen.

Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Hipotesis Kuznets, PDRB per kapita, Investasi, aglomerasi, dan desentralisasi fiskal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta, pembuktian Hipotesis Kuznets serta menganalisis pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dan kebijakan Desentralisasi fiskal sebagai dummy waktu terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di DKI Jakarta selama 14 tahun (1995-2008).

Penulis menyadari bahwa selama penulisan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari bebrbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Moch. Chabacib, M.Si, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. H Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan nasehat dan motivasi.
3. Ibu Banatul Hayati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU, Bapak Firmansyah, SE, MSi, dan Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE., MSi yang telah memberikan banyak ilmu, nasehat, dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Undip khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, terima kasih atas segala ilmu, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama belajar di Universitas Diponegoro.
7. Papa dan Mama tercinta yang telah mendidik, memberi nasehat, semangat dan memberikan yang terbaik serta tempat berbagi dalam cinta dan kasih sayang.
8. Adikku Feby Puspitasari yang selalu memberikan semangat dengan canda tawa dan membantu penulis terutama pada saat mengumpulkan data.
9. Arief Mawardi yang selalu menemani dan memberikan semangat, masukan, serta motivasi terutama ketika penulis sedang jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaikku: Atika Dwi Kaesti, Rica Amanda, Selly Kartika, Indra Riady, yang telah menjadi keluargaku di Semarang, selalu bersama-sama dalam suka dan duka, selalu bermimpi untuk dapat keliling dunia menggapai cita-cita (harus tercapai!! Amin. Hehehe).
11. Teman-teman IESP angkatan 2006 yang telah memberikan warna kehidupan selama menjalani kuliah di Undip: Sasya, Feby, Putranti, Dwi Hapsari (gea), Desi,

Ratna, Ririn, Ari, bertha, Dimas (teman seperjuangan, tetap semangat!!), Fajar, Abra, Bahrul, dan Isom yang lainnya (maaf tidak bisa menyebutkan semuanya) atas kekompakan dan kebersamaannya.

12. Mas adit kembar (IESP 05) yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para Pelangi Residence (budepong, ociin, tami, sekar, yoyo, Diana, cika, mb joice, mb zarina, kak Pamela, mb wulan, mb puput, mb anis, mb pimpim (dan semuanya yang telah silih berganti, maaf tidak dapat menyebutkan semuanya), terima kasih karena sudah menjadi keluargaku selama di semarang, senang dan sedih di lewati bersama,
14. Kesmacious BEM KM Undip 2008 (Agy, mb rifka, halimah, dini, bundo tyas, didik, aris, opung wahyu, dimas, fariz, dita) yang telah memberikan kenangan yang indah atas persahabatan, kekompakan baik dalam suka dan duka.
15. Pengurus harian BEM KM 2009 atas kebersamaan yang menyenangkan selama 1 tahun serta banyak memberikan ilmu bagi penulis terutama dalam hal organisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis di depannya. Amin
16. Segenap staf dan karyawan FE UNDIP: Reguler 1 dan Reguler 2, atas bantuannya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pembaca dan memberikan sumbangsih kepada Universitas Diponegoro.

Semarang, September 2010

Penulis

Yuki Angelia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Landasan Teori.....	18
2.1.1. Pembangunan Ekonomi.....	18
2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	20
2.1.3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	21

2.1.3.1	Model Pertumbuhan Neo-Klasik.....	21
2.1.3.2	Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik	24
2.1.3.3	Aglomerasi	25
2.1.3.4	Hipotesis Kuznets.....	27
2.1.4	Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	30
2.1.4.1	Indeks Williamson.....	32
2.1.4.2	Indeks Entropy Theil	32
2.1.4.3	Konsep PDRB Per kapita Relatif	33
2.1.5	Hubungan Antara PDRB per kapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	34
2.1.6	Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	35
2.1.7	Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan wilayah.....	36
2.1.8	Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	37
2.2	Penelitian Terdahulu	40
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	46
2.4	Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	50
3.1.1	Variabel Penelitian	50
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	50
3.2.	Jenis dan Sumber Data	53
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.4.	Metode Analisis	55
3.4.1	Korelasi Pearson.....	55
3.4.2	Analisis Regresi	56

3.4.3	Estimasi Model Regresi	56
3.4.4	Uji Asumsi Klasik.....	59
3.4.4.1	Multikolinearitas	59
3.4.4.2	Heteroskedastisitas	61
3.4.4.3	Autokorelasi	62
3.4.4.4	Normalitas	62
3.4.5	Uji Statistik	63
3.4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	63
3.4.5.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	64
3.4.5.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	64
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.1.1	Letak Geografis dan Tata Guna Lahan	67
4.1.2	Kondisi Penduduk	69
4.1.3	Kondisi Ekonomi	71
4.1.3.1	Produk Domestik Regional Bruto Per kapita (PDRB Per kapita)	71
4.1.3.2	Investasi.....	73
4.1.3.3	Aglomerasi	75
4.2.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	76
4.3.	Pembuktian Hipotesis Kuznets	79
4.4.	Analisis Data	81
4.4.1	Pengujian Model Asumsi Klasik.....	83
4.4.1.1	Uji Multikolinearitas	83
4.4.1.2	Uji Heteroskedastisitas	85
4.4.1.3	Uji Autokorelasi	86
4.4.1.4	Uji Normalitas	87

4.4.2	Pengujian Statistik Analisis Regresi.....	88
4.4.2.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	88
4.4.2.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	88
4.4.2.3	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	89
4.5.	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	90
4.5.1	Pengaruh PDRB perkapita, Investasi, Aglomerasi, Dummy Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	90
BAB V	PENUTUP.....	97
5.1.	Kesimpulan	97
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	99
5.3.	Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia Tahun 1995-2000.....	3
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2003-2007 (Milyar Rupiah)	8
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita dan PDRB Provinsi DKI Jakarta.....	9
Tabel 1.4 Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta Tahun 1990-1994.....	11
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 1995-2008	70
Tabel 4.2 Penduduk DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 2008.....	71
Tabel 4.3 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 (Juta Rupiah)	74
Tabel 4.4 Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	76
Tabel 4.5 Tingkat Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	78
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Utama.....	83
Tabel 4.7 <i>Auxiliary Regression</i>	84
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi Antar Variabel.....	85
Tabel 4.9 Uji White.....	85
Tabel 4.10 Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation LM test	87
Tabel 4.11 Uji Jarque-Berra.....	87
Tabel 4.12 Uji Statistik t	89

Tabel 4.13 PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah) dan Ketimpangan Wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008	92
Tabel 4.14 PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	6
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2003-2007.....	8
Gambar 2.1 Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas, 1994-2000.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	48
Gambar 4.1 PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008.....	72
Gambar 4.2 Kurva Hubungan Antara Indeks Ketimpangan Wilayah dengan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 .	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data

Lampiran B Hasil Regresi Utama

Lampiran C Uji Asumsi Klasik : Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokolerasi,
Normalitas

Lampiran D Lain-Lain

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985). Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara Dunia Ketiga atau yang lebih sering disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara-negara yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pembangunan ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang ialah keinginan dari NSB untuk dapat mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Negara Indonesia terdiri atas 33 Provinsi memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Armida S. Alisjahbana (2005) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antardaerah yang lebih lebar. Pada tingkat Provinsi, masih terjadi ketimpangan selama tahun 1990an sampai 2000.

Tabel 1.1
Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia Tahun 1995-2000

Provinsi	Tahun					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
DI.Aceh	0,48	0,42	0,35	0,41	0,36	0,17
Sumatera Utara	0,01	0,01	0,02	0,04	0,09	0,04
Sumatera Barat	0,17	0,14	0,13	0,06	0,03	0,06
Riau	1,46	1,26	1,17	1,34	1,39	1,21
Jambi	0,38	0,34	0,35	0,30	0,27	0,30
Sumatera Selatan	0,12	0,11	0,11	0,06	0,17	0,12
Bengkulu	0,42	0,40	0,41	0,36	0,34	0,44
Lampung	0,51	0,49	0,49	0,46	0,43	0,46
Kep.Bangka Belitung	*	*	*	*	*	0,05
DKI Jakarta	2,66	3,12	3,19	2,99	2,98	2,99
Jawa Barat	0,19	0,21	0,21	0,26	0,33	0,21
Jawa Tengah	0,33	0,35	0,36	0,34	0,30	0,33
DI Yogyakarta	0,18	0,22	0,22	0,18	0,16	0,19
Jawa Timur	0,15	0,15	0,14	0,16	0,14	0,17
Banten	*	*	*	*	*	0,03
Bali	0,15	0,12	0,13	0,25	0,27	0,21
Kalimantan Barat	0,15	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08
Kalimantan Tengah	0,13	0,16	0,16	0,23	0,24	0,11
Kalimantan Selatan	0,04	0,01	0,01	0,07	0,13	0,09
Kalimantan Timur	3,04	3,22	3,22	3,68	3,90	3,61
Sulawesi Utara	0,37	0,38	0,38	0,30	0,41	0,19
Sulawesi Tengah	0,46	0,46	0,46	0,41	0,39	0,45
Sulawesi Selatan	0,41	0,41	0,40	0,35	0,33	0,37
Sulawesi Tenggara	0,53	0,54	0,54	0,51	0,50	0,54
Gorontalo	*	*	*	*	*	0,44
Nusa Tenggara Barat	0,59	0,59	0,59	0,54	0,51	0,45
Nusa Tenggara Timur	0,65	0,66	0,66	0,62	0,60	0,61
Maluku	0,32	0,28	0,28	0,21	0,63	0,44
Maluku Utara	*	*	*	*	*	0,41
Timor Timur	0,62	0,63	0,63	**	**	**
Irian Jaya/Papua	0,61	0,71	0,74	1,22	1,14	0,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

* Belum terbentuk sebagai provinsi Indonesia

** Sudah tidak menjadi bagian dari provinsi Indonesia

Selama tahun 1995-2000 masih terjadi ketimpangan wilayah pada provinsi-provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif. Apabila nilai PDRB per kapita relatif lebih dari 1 maka menunjukkan wilayah tersebut semakin timpang, sedangkan bila nilai PDRB per kapita relatif semakin mendekati 0 maka semakin merata (Jaime Bonet, 2006). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tingkat ketimpangan tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,61, DKI Jakarta sebesar 2,99, dan Riau sebesar 1,21. Sedangkan ketimpangan paling rendah berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,04 dan Kalimantan Selatan sebesar 0,09.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi, sebab ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan sevara keseluruhan di dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih kecil lagi dari pendapatan marjinal mereka (Todaro, 2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang

tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

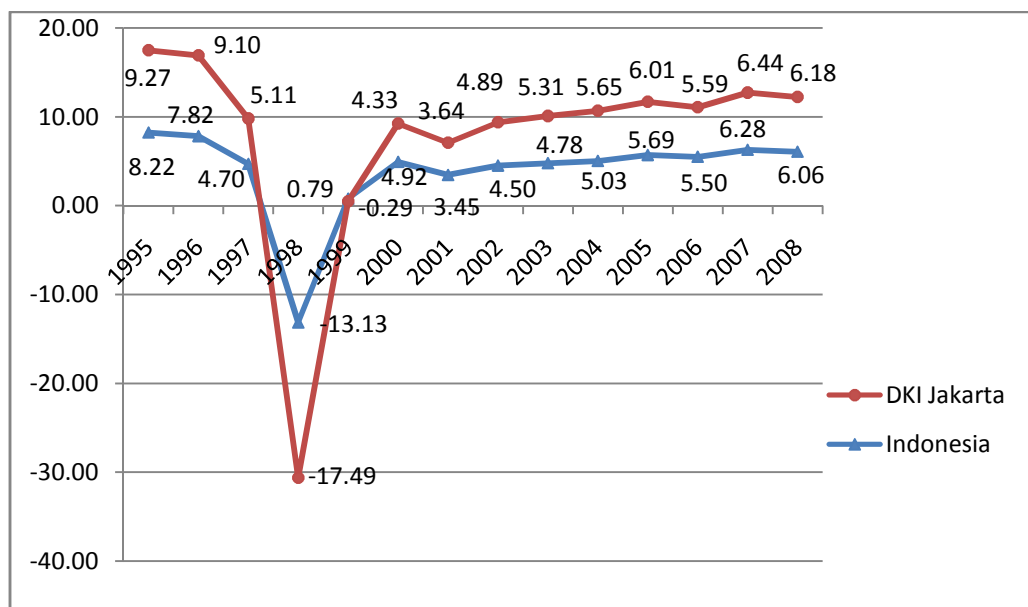
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Di mana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah yang makmur. Prof. Simon Kuznets mengemukakan enam karakter atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut (Todaro, 2004) :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Simon Kuznets (Todaro, 2006) juga mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan pun akan membaik. Hal ini sebagian besar dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznets “U-Terbalik”.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional seperti terlihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 1995-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, Jakarta

Gambar 1.1 menggambarkan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1995-2008. DKI Jakarta memiliki laju pertumbuhan yang cenderung meningkat dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Pada tahun 1998 dan 1999 laju pertumbuhan wilayah ini mengalami penurunan cukup tinggi hingga angka -17.49% dan -0.29% dikarenakan krisis ekonomi yang dialami Indonesia dan juga berdampak pada wilayah-wilayah di dalamnya termasuk DKI

Jakarta. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kembali meningkat hingga tahun 2008.

Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa DKI Jakarta sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi hal ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di DKI Jakarta terjadi secara merata. Terlebih dahulu perlu diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena kontribusi seluruh masyarakat atau hanya sebagian masyarakat saja.

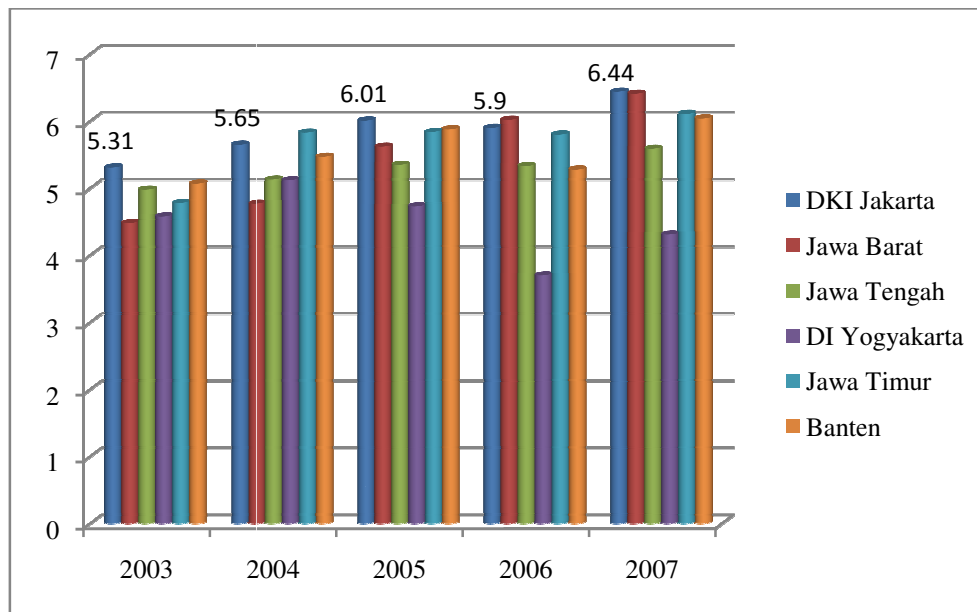
DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki tingkat potensi kemakmuran di Pulau Jawa. Dari tabel 1.2 dan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa setiap provinsi pada Pulau Jawa memiliki tingkat potensi kemakmuran yang berbeda-beda. Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat. Dari 6 Provinsi di Pulau Jawa DKI Jakarta memiliki pertumbuhan PDRB yang paling tinggi, kemudian kedua adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah dan terendah adalah DI Yogyakarta.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa,
Tahun 2003-2007 (Miliar Rupiah)

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2003	263.624	219.525	129.166	15.360	228.884	51.957
2004	278.525	230.003	135.790	16.146	242.229	54.880
2005	295.271	242.884	143.051	16.911	256.375	58.107
2006	312.827	257.499	150.683	17.536	271.249	61.342
2007	332.971	274.180	159.110	18.292	287.814	65.047

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, Jakarta

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di
Pulau Jawa Tahun 2003-2007



Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, Jakarta

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan meningkat serta didukung posisinya sebagai Ibukota Negara, telah membuat DKI Jakarta memiliki *bargaining*

position yang cukup tinggi khususnya di Pulau Jawa. DKI Jakarta yang merupakan Kota Megapolitan memberikan ketertarikan sendiri tidak hanya bagi Provinsi-Provinsi lain tetapi juga bagi masyarakat DKI Jakarta sendiri untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan di mana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi seluruh masyarakat.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita dan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008

	Laju pertumbuhan PBDR Per kapita	Laju Pertumbuhan PDRB
1995	7.12	9.27
1996	19.50	9.10
1997	4.94	5.11
1998	-17.62	-17.49
1999	-0.45	-0.29
2000	3.72	4.33
2001	4.25	3.64
2002	4.05	4.89
2003	4.46	5.31
2004	3.44	5.65
2005	4.69	6.01
2006	4.73	5.59
2007	5.25	6.44
2008	5.19	6.18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Beberapa Tahun Terbitan, diolah

Peningkatan serta tingginya pertumbuhan di DKI Jakarta diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila

dilihat dari tabel 1.3 mengenai Laju pertumbuhan PDRB per kapita di DKI Jakarta menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita cenderung lebih rendah dari laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta. Tahun 1996 laju pertumbuhan PDRB per kapita mencapai titik tertinggi hingga 19,50% selama 14 tahun terakhir akan tetapi kembali menurun hingga titik terendah pada tahun 1998 yaitu sebesar -17,62%. Penurunan ini juga sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi setelah krisis laju pertumbuhan PDRB per kapita kembali meningkat walaupun peningkatan tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya ketimpangan di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut juga meningkat. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk (Todaro,2004).

Ketimpangan yang terjadi di DKI Jakarta ini di sebabkan oleh banyak faktor. Seperti pada teori Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Menurut Myrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi

dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi.

Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1990). Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Tabel 1.4
Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta Tahun 1990-1994

Tahun	PMA (Milyar US \$)	PMDN (Milyar Rp)
1990	1.619,3	3.272,3
1991	4.216,6	3.604,4
1992	1.132,5	4.002,0
1993	1.669,1	8.828,9
1994	1.832,3	5.968,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan

Tabel 1.4 menunjukkan nilai investasi swasta (PMA dan PMDN) di Provinsi DKI Jakarta tahun 1990-1994. Selama tahun 1990-1994 terlihat bahwa investasi swasta yang masuk baik dari asing maupun dalam negeri jumlahnya fluktuatif dan cenderung tinggi. Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Disisi lain seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang

memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.

Selain Investasi, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008). Konsentrasi kegiatan ekonomi yang belakangan banyak diterapkan oleh berbagai wilayah termasuk DKI Jakarta yaitu aglomerasi. Aglomerasi menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Amini Hidayati dan Mudrajad Kuncoro, 2004).

Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Sjafrizal, 2008). Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Disamping itu, penetapan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses

yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Penetapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sjafrizal (2008) mengemukakan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergali. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “*Block Grant*” berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian diharapkan proses pembangunan daerah secara

keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi (Sjafrizal,2008).

Dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1995-2008”** untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di DKI Jakarta dan pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di DKI Jakarta. Selain itu, juga pembuktian atas hipotesis Kuznets mengenai kurva “U Terbalik” apakah berlaku di DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. PDRB per kapita menunjukkan tingkat pembangunan suatu wilayah. Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pertumbuhan tinggi dan bahkan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, pendapatan per kapita cenderung meningkat selama tahun penelitian. Akan tetapi laju pertumbuhan PDRB per kapita DKI Jakarta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di DKI Jakarta belum terlaksana secara merata.

Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar antara wilayah satu dengan lainnya. Disamping itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya aglomerasi dan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal.

Dari penjelasan sebelumnya maka pertanyaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

- a. Seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008?
- b. Apakah hipotesis Kuznets tentang Kurva “U Terbalik” berlaku di Provinsi DKI Jakarta?
- c. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, serta dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Membuktikan apakah hipotesis “U Terbalik” Kuznets berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

- c. Menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat mengenai keadaan obyek penelitian, kondisi penduduk, kondisi ekonomi dan dilanjutkan dengan analisis ketimpangan pembangunan wilayah, pembuktian Hipotesis Kuznets, dan analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas dasar penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1985), walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat, Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto* atau GDP). Namun demikian cara tersebut memiliki kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada saat terjadi pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi pula pertambahan penduduk. Oleh

karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Perbedaan yang timbul ini menyebabkan beberapa ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Para ekonom menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai (Lincoln Arsyad, 1997) :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diberengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di negara sedang berkembang (Lincoln Arsyad, 1997).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Lincoln Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincoln Arsyad, 1997).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Lincoln Arsyad, 1997).

Menurut Arsyad (1997) keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan

perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya konsisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah kedaerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.1.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

2.1.3.1 Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama Model Pertumbuhan Neo-Klasik (Boediono,1992). Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model neo-klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978) dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis (Sjafrizal, 2008) :

$$Y = A K^\alpha L^\beta, \alpha + \beta = 1 \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga kerja. Karena analisa mnyangkut pertumbuhan maka semua variabel adalah fungsi waktu (t). Dengan mengambil turunan matematika persamaan (2.1) terhadap variabel t diperoleh :

$$y = a + \alpha k + (1 - \alpha) l \dots\dots\dots(2.2)$$

dimana $y = dY/dt$ menunjukkan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi), $a = dA/dt$ menunjukkan perubahan teknologi produksi (secara netral), $k = dK/dt$ menunjukkan penambahan modal (investasi) dan $l = dL/dt$ penambahan jumlah dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Selanjutnya, bila aspek daerah dimasukkan ke dalam analisa ini, maka peningkatan modal di suatu daerah tidak hanya berasal dari tabungan di daerah itu saja, tetapi berasal juga dari modal yang masuk dari luar daerah. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$k_i = (s_i/v_i) + \sum_{j=1}^n k_{ji} \dots\dots\dots(2.3)$$

dimana s_i adalah *Marginal Propensity to Save* (MPS) di daerah i , v_i adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) daerah i . Sedangkan k_{ji} adalah jumlah modal yang masuk dari daerah lain ke daerah i .

Sama halnya dengan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja daerah i tidak saja disebabkan kerana pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan saja, tetapi juga karena arus perpindahan penduduk masuk (*immigration*) ke daerah yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$l_i = n_i + \sum_{j=1}^n m_{ji} \dots\dots\dots(2.4)$$

dimana n_i merupakan pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan, m_{ji} adalah penduduk yang masuk (*immigration*) ke daerah i yang datang dari daerah lainnya j .

Perpindahan modal (k_{ji}) dari daerah j ke daerah i terutama oleh tingkat pengembalian modal, r , yang tinggi di daerah i dibandingkan dengan daerah j . Demikian juga dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena ada perbedaan tingkat upah, w . Berdasarkan hal ini maka dapat ditulis :

$$k_{ji} = f_k (r_i - r_j) \dots\dots\dots(2.5)$$

$$m_{ji} = f_l (w_i - w_j) \dots\dots\dots(2.6)$$

Penganut Model Neo-Klasik (dalam Sjafrizal, 2008) beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*).

2.1.3.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

Myrdal dalam M.L Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

Myrdal (Jhingan, 1993) mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta

keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan,1993).

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Prof. Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 1993).

Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993).

2.1.3.3 Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada pula

daerah yang tingkat pertumbuhannya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata (Kartini H. Sihombing, 2008).

Montgomery dalam Mudrajad Kuncoro (2002) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

Menurut Robinson Tarigan (2007), keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*. *Economic of scale* adalah keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan.

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses

pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

2.1.3.4 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro,2004).

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

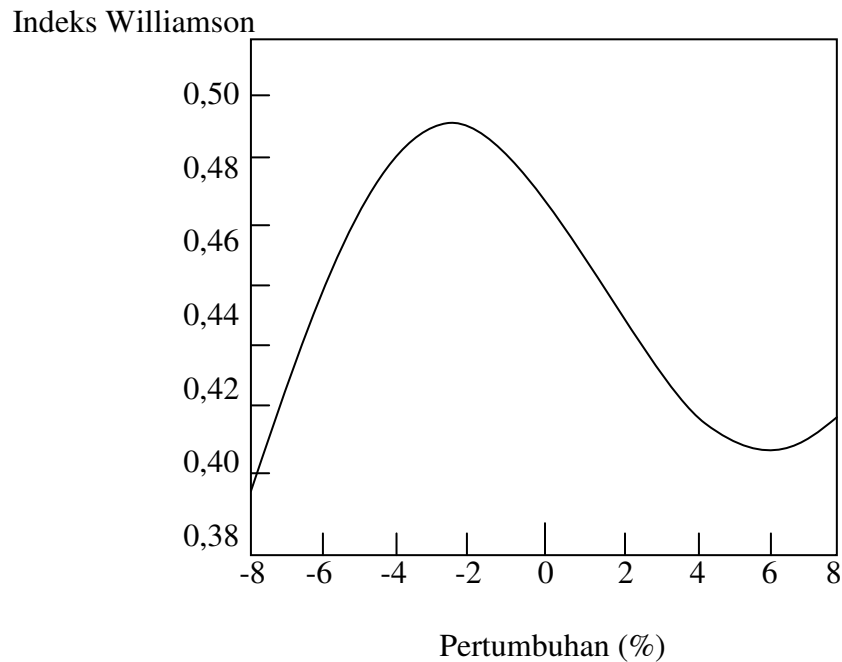
1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Dua Faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional (Todaro, 2004).

Sebelumnya Hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro pada Kabupaten Banyumas. Pada penelitannya Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan dan melihat hubungannya terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas.

Gambar 2.1
Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Banyumas, 1994-2000



Sumber : Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003)

Hasil dari penelitian Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, dimana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Pada akhirnya analisis kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antar

negara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya. Kritik utama terhadap kuva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitif terhadap ukuran *inequality* dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.

2.1.4 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincoln Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi

suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu indeks Williamson, indeks Entropy Theil dan Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB per Kapita Relatif.

2.1.4.1 Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2008):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2.7)$$

Dimana :

- Y_i = PDRB per kapita daerah i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson berkisar antara 0 < IW < 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

2.1.4.2 Indeks Entrophy Theil

Ying dalam Kuncoro (2006) menjelaskan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, juga menggunakan indeks ketimpangan regional Theil. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan

selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Adapun rumus untuk menghitung Indeks Entrophy Theil adalah sebagai berikut :

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_j}{Y}\right) x \log\left[\frac{\left(\frac{y_j}{Y}\right)}{\left(\frac{x_j}{X}\right)}\right] \dots\dots\dots(2.8)$$

Di mana :

- I(y) : Indeks Entrophy Theil
- y_j : PDRB per kapita kota/kabupaten j
- Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi
- x_j : Jumlah penduduk kota/kabupaten j
- X : Jumlah penduduk Provinsi

Sama hanya dengan Indeks Willamson, Indeks Entrophy Theil berkisar antara 0 < IET < 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti.

2.1.4.3 Konsep PDRB per Kapita Relatif

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus :

$$RD_{it} = \left| \frac{\text{PDRB Per kapita } i,t}{\text{PDB Per Kapita } Na,t} - 1 \right| \dots\dots\dots(2.9)$$

dimana :

RD = Ketimpangan wilayah Provinsi i, tahun t

PDRB per kapita $y_{i,t}$ = PDRB per kapita pada Provinsi i pada tahun t

PDB per kapita Na,t = PDB per kapita Indonesia pada tahun t

2.1.5 Hubungan antara PDRB per kapita dan Ketimpangan Pembangunan

Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk (Arsyad,1997). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang

menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal,2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmeratan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006).

2.1.6 Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan. Menurut Myrdal

(Jhingan, 1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

2.1.7 Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan wilayah

Sjafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik (Sjafrizal, 2008).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), dimana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapatan regional. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antara aglomerasi produksi dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.

2.1.8 Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Semenjak ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah memiliki dominasi terhadap usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Sjafrizal (2008) menguraikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penelitiannya sebelumnya telah dilakukan oleh Vibiz Regional Research (2008) mengenai efektifitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan indeks Williamson, ketimpangan pada ke-33 Provinsi di Indonesia semakin tinggi setelah adanya desentralisasi fiskal. Jamie Bonet (2006) juga pernah meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan wilayah dengan bukti

pengalaman dari negara Kolombia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bonet membuktikan bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional. Akan tetapi ini berdeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessmann (2006) yang menganalisis mengenai “Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional : Menggunakan Pendekatan Data Panel Pada Negara-Negara OECD”. Dalam penelitiannya Lessmann menemukan bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi, wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
Sutarno dan Mudrajad Kuncoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengklasifikasikan kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita? 2. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar kecamatan? 3. Membuktikan hipotesis Kuznet tentang U terbalik apakah berlaku di Kabupaten Banyumas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan Ekonomi Regional menggunakan Indeks Tropy Theil $I_{Theil} = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) x \log \left(\frac{y_j}{Y} \right) / \left(\frac{x_j}{X} \right)$ Dimana : y_j = PDRB per kapita per propinsi ke j x_j = Jumlah penduduk per propinsi ke j Y = PDRB Indonesia X = Jumlah penduduk Indonesia 2. Indeks Williamson $IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$ Dimana : Y_i = PDRB per kapita di Kecamatan i Y = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Banyumas f_i = Jumlah penduduk di kecamatan i n = Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas 3. Tipologi Klassen Alat analisis tipologi Klassen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal. 2. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. 3. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama

		digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah.	periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.
--	--	--	---

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
Budiantoro Hartono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981 – 2005? 2. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981 - 2005? 3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005? 	$Vw_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \varepsilon_t$ <p>Dimana :</p> <p>Vw = Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>X_1 = Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah per kapita.</p> <p>X_2 = Ratio Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>X_3 = Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Daerah per kapita di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>α_0 = konstanta.</p> <p>$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien masing-masing dari X_1, X_2, X_3</p> <p>t = tahun.</p> <p>ε_t = faktor gangguan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. 2. Nilai investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan alokasi bantuan pembangunan daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan perkapita ekonomi di Provinsi Jawa Tengah baik secara parsial maupun simultan. 3. Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun. 4. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan kesempatan

	<p>4. Bagaimana pengaruh alokasi dana bantuan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2005?</p>		<p>kerja baru dapat mengurangi ketimpangan. Hal ini karena penyerapan angkatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <p>5. Alokasi dana bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang tidak merata dan daerah yang mendapat bantuan terlalu besar dapat meningkatkan tingkat ketimpangan antar daerah. Hal ini akibat pembangunan yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang masih tertinggal, karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari daerah yang belum maju.</p>
--	--	--	---

Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional : Pendekatan Panel Data untuk “OECD Countries”

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
Christian Lessmann	<p>1. Apakah ketimpangan wilayah lebih besar pada negara-negara yang menerapkan sentralisasi ataukah desentralisasi? (menggunakan Cross-section)</p> <p>2. Penelitian ini</p>	<p>Model untuk Cross-section :</p> $Disparity_i = \alpha + \beta Control_i + \gamma Decentralization_i + \varepsilon_i$ <p>Dimana :</p> <p>$Disparity_i$: rata-rata dari ukuran yang berbeda untuk ketimpangan regional dari tahun 1980-2000 pada negara i.</p> <p>$Control_i$: sebuah penngakapan garis vektor dari beberapa variabel control yang telah dijelaskan.</p> <p>$Decentralization_i$: mewakili rata-rata</p>	<p>Dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi berhubungan kuat dengan rendahnya ketimpangan regional. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.</p>

	<p>untuk merubah pada struktur federal dan resiko atas pemusatan. (menggunakan data panel)</p>	<p>periode dari ukuran yang berbeda dari desentralisasi.</p> <p>Model untuk analisis panel: $Disparity_{i,t} = \alpha_i + \beta Control_{i,t} + \gamma Decentralization_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$ dimana α_i mewakili <i>Fixed Effects</i> suatu negara.</p>	
--	--	--	--

Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Pendapatan Regional : Bukti dari Pengalaman Kolombia

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
Jaime Bonet	Klarifikasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketidakseimbangan pendapatan regional di Kolombia.	$I_{i,t} = \beta_1 + \beta_2 FD_{i,t} + \beta_3 CV_{i,t} + \mu_{i,t}$ Dimana $I_{i,t}$ adalah penerimaan regional, yang didapat dari $I_{i,t} = \left \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right $ PCGDP _{i,t} adalah pendapatan provinsi per kapita, dan PCGDP _{NAL,t} adalah pendapatan nasional per kapita.	Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), invetsasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap ktimpangan pendapatan regional.

Efektifitas Faktor Input dan Ketimpangan Pendapatan Daerah setelah Desentralisasi Fiskal

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
<p>Vibiz Economic Reseaerch Center</p>	<p>1. Bagaimana efektifitas penggunaan <i>factor Endowment</i> daerah di Indonesia tahun 2000-2006 dalam meningkatkan PDRB?</p> <p>2. Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia selama tahun 2000-2006?</p>	<p>1. Model Makro ekonomi Ekonometrika $Y = f(K,L,HC,DF)$ Untuk lebih riil dan akurat, model ini disajikan dalam bentuk logaritma.</p> $\text{Log}Y = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log}K + \alpha_2 \text{Log}L + \alpha_3 \text{Log}HC + \alpha_4 \text{Log}DF$ <p>Dimana : Y : PDRB Provinsi Di Indonesia K : Investasi dalam bentuk PMTDB propinsi di Indonesia HC : Human Capital atau jumlah SDM yang ada di setiap propinsi di Indonesia DF : Variabel Dummy yaitu masa setelah adanya desentralisasi fiskal di Indonesia 2000-2006=1, sisanya=0</p> <p>2. Model Deterministik Weighted Coefficient Variation (CV)</p> $CV_w = \frac{1}{y} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{P_i}{P}}$	<p>1. Berdasarkan penelitian menggunakan model pertumbuhan regional ternyata <i>factor endowment</i> variabel investasi yaitu capital, labor, <i>human capital</i> signifikan mempengaruhi PDRB provinsi di Indonesia. Artinya jika pemerintah provinsi meningkatkan <i>factor endowment</i> daerah tersebut maka PDRB daerah tersebut akan meningkat pula.</p> <p>2. Indeks Williamson setelah desentralisasi fiskal 0,96, sebuah angka mendekati 1. Range Indeks Williamson adalah antara $0 < \text{indeks Williamson} < 1$. Jika mendekati satu maka distribusi pendapatan nasional menjadi semakin timpang. Jadi setelah desentralisasi, distribusi pendapatan termasuk kategori timpang.</p>

		<p>Keterangan :</p> <p>CV_w: Koefisien Variasi Williamson</p> <p>P : Jumlah penduduk secara nasional</p> <p>P_i : Jumlah penduduk pada daerah ke-i</p> <p>Y_i : Pendapatan per kapita daerah ke-i</p> <p>Y : Pendapatan per kapita nasional</p> <p>n : Banyaknya daerah</p>	
--	--	--	--

Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia, 1992-2001

Peneliti	Permasalahan Penelitian	Model	Hasil
Diana Wijayanti	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi pola kesenjangan regional di Indonesia. Mengidentifikasi pola kesenjangan regional, sebelum krisis ekonomi (1992-1997) dan sesudah krisis ekonomi (1998-2001) di Indonesia. Mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. 	$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_{1it}K_{i,t} + \beta_{2it}L_{i,t} + \beta_{3it}E_{it} + \beta_{4it}IG_{it} + \beta_{5it}T_{it} + D_{krisis} + e_i$ <p>Dimana :</p> <p>Y_{it} = Pertumbuhan PDRB per kapita non migas atas dasar harga konstan 1993</p> <p>K_{it} = Rasio pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB atas dasar harga konstan 1993</p> <p>L_{it} = Jumlah angkatan kerja</p> <p>E_{it} = Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan menengah</p> <p>IG_{it} = Rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDRB atas dasar harga konstan 1993</p> <p>T_{it} = Konsentrasi Industri secara spasial, dihitung dengan Indeks Theil</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hasil perhitungan kesenjangan dengan menggunakan indeks Theil selama periode 1992-2000, cenderung terjadi pola penurunan kesenjangan regional. Tingkat kesenjangan terendah terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi kesenjangan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa semua variabel secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita kecuali modal.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan wilayah juga merupakan masalah yang belum dapat dihapuskan pada di Indonesia. Di Indonesia sebagai negara NSB tingkat ketimpangan wilayah tinggi tahun 1995-2000 salah satunya terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

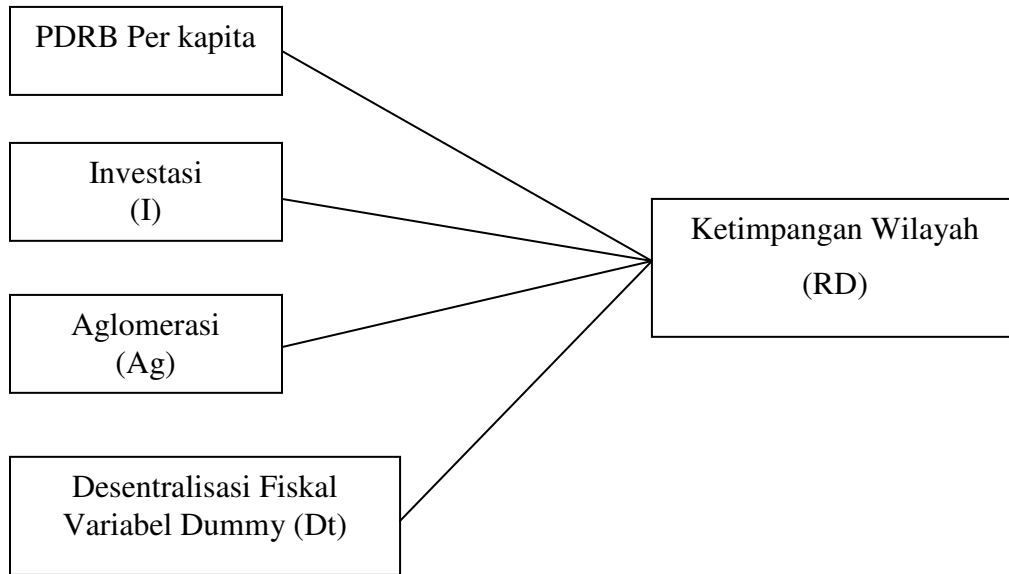
Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk masuk. Seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam Jhingan (1993) ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang mementingkan motif laba. Dimana wilayah yang memiliki harapan laba tinggi akan lebih berkembang pesat karena mendorong banyaknya investasi yang masuk. Hal ini

secara tidak langsung merugikan wilayah-wilayah terbelakang. Perbedaan yang terjadi ini akan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Konsentrasi kegiatan ekonomi berupa aglomerasi belakangan ini banyak diterapkan oleh wilayah-wilayah termasuk DKI Jakarta. Adanya aglomerasi diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Akan tetapi aglomerasi memiliki dampak yang kurang baik bagi ketimpangan wilayah. Dimana wilayah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan semakin terbelakang. Oleh karena itu, aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah. Kebijakan ini berupa penetapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada dasarnya penetapan kebijakan ini bertujuan baik karena daerah dapat dengan semaksimal mungkin untuk melakukan aktifitas pembangunan daerahnya. Selain itu, berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Kebijakan ini juga memaksa setiap daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap wilayahnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dijadikan variabel dummy untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Sjafrizal, 2008, dimodifikasi

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah
- b. Diduga terdapat hubungan positif antara investasi dengan ketimpangan wilayah
- c. Diduga terdapat hubungan positif antara Aglomerasi dengan ketimpangan wilayah
- d. Diduga terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan wilayah (RD). Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, investasi (I), aglomerasi (Ag) dan *dummy time* (Dt) sebagai variabel boneka untuk kebijakan desentralisasi fiskal.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (RD)

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006) dan Atur. J Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Adapun rumus dari pendekatan PDRB per kapita relatif sebagai berikut:

$$RD_{i,t} = \left| \frac{PDRB\ p.c\ it}{PDB\ p.c\ Nat,t} - 1 \right| \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

RD_{it} = Ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta

$PDRB_{p.c\ it}$ = PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi
DKI Jakarta (Rupiah)

$PDB_{p.c\ Nal,t}$ = PDB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia
(Rupiah)

b. PDRB Per kapita

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik, PDRB per kapita merupakan variabel yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal,2008).

Adapun cara mengukur PDRB per kapita suatu wilayah yaitu :

$$PDRB\ perkapita = \frac{PDRB_i}{Jumlah\ Penduduk_i} \dots\dots\dots(3.2)$$

di mana :

$PDRB_i$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Provinsi DKI Jakarta (Rupiah)

$Jumlah\ Penduduk_i$ = Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)

c. Investasi

Investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri). Data Investasi yang digunakan adalah PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta yang telah direalisasi

menurut lokasi bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan satuan rupiah.

d. Aglomerasi (Ag)

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari *Share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$Ag = \frac{PDRB_i}{PDRB_{tot}} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana :

Ag = Aglomerasi produksi

PDRB_i = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DKI Jakarta
(Rupiah)

PDRB_{tot} = Total PDRB atau PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia
(Rupiah)

e. *Dummy Time*

Dalam semua model regresi, variabel tak bebas Y dan variabel penjelas X bersifat bilangan kuantitatif. Namun hal ini tak selalu berlaku, dan ada kalanya variabel-variabel penjelas bisa bersifat kualitatif. Variabel kualitatif ini sering dikenal dengan variabel buatan atau variabel dummy atau variabel boneka (Gujarati,2006). Variabel dummy ini ditunjukkan dengan

angka 0 dan 1, dimana atribut 0 menunjukkan sebelum desentralisasi fiskal dan atribut 1 menunjukkan setelah desentralisasi fiskal. Penggunaan *dummy time* dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terjadi perbedaan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal.

3.2 Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Anto Dajan (1991) yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Definisi lain dari data sekunder menurut Kuncoro (2004) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta dalam beberapa terbitan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 Indonesia tahun 1994-2001
- b. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 Indonesia tahun 2001-2008

- c. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 DKI Jakarta tahun 1994-2001
- d. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 DKI Jakarta tahun 2001-2008
- e. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk dan kecamatan tahun 1995-2008
- f. Data PDRB atas dasar harga konstan 1993 Indonesia tahun 1994-2001
- g. Data PDRB atas dasar harga konstan 2000 Indonesia tahun 2001-2008
- h. Data PDRB Atas dasar harga konstan 1993 DKI Jakarta tahun 1994-2001
- i. Data PDRB Atas dasar harga konstan 2000 DKI Jakarta tahun 2001-2008
- j. Data investasi pihak swasta yaitu PMA dan PMDN yang telah direalisasikan Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008.

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua yakni perhitungan tingkat ketimpangan wilayah menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif dan pembuktian Hipotesis Kuznets dijelaskan melalui gambar dan Korelasi Pearson . Sedangkan analisis regresi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

3.4.1 Kolerasi Pearson

Kolerasi Pearson sering disebut dengan korelasi produk momen atau kolerasi saja. Nilai dari koefisien korelasi ini adalah r yang besarnya antara -1 hingga 1 . Jika $r < 0$ maka dikatakan berkorelasi negatif, artinya jika nilai salah satu peubah semakin besar maka peubah yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya jika $r > 0$ dikatakan terjadi hubungan linear yang positif. Jika $r = 0$ dikatakan tidak berkorelasi tetapi bukan berarti tidak berhubungan. Mungkin berhubungan namun tidak linear. Semakin dekat nilai r dengan 1 atau -1 maka semakin erat hubungan linear antar peubah tersebut. Adapun rumus dari Korelasi Pearson (Husaini Usman dalam Mulyanto Sudarmono, 2006) yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana :

- r_{xy} = Koefisien kolerasi yang dicari
- Σxy = Jumlah perkalian variabel x dan y
- Σx = Jumlah nilai variabel x
- Σy = Jumlah nilai variabel y
- Σx^2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel x
- Σy^2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel y
- n = Banyaknya sampel

3.4.2 Analisis Regresi

Analisis regresi ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari faktor PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Pada penelitian ini, analisis regresi dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan Program Eviews 6.0. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data *time-series*. Adapun model persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.5)$$

dimana T adalah banyak data *time-series*.

3.4.3 Estimasi Model regresi

Analisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, inmigran, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah menggunakan data *time-series* selama 14 (empat belas) tahun yang diwakili data tahunan dari 1995-2008 yang

menghasilkan 14 observasi. Model dasar ketimpangan wilayah dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$RD = f(\text{PDRB per kapita}, I, Ag) \dots\dots\dots(3.6)$$

di mana :

- RD = ketimpangan wilayah (*regional disparity*)
- PDRB per kapita = Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000
- I = Investasi (*Investment*)
- Ag = Aglomerasi (*Agglomeration*)

Model dasar tersebut akan diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut :

$$RD_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{PDRB per kapita}_t + \alpha_3 I_t + \alpha_4 Ag_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.7)$$

Dimana t menunjukkan *time series* (periode waktu).

Dalam Sjafrizal (2008) dijelaskan karena hubungan antara ketimpangan wilayah dengan tingkat ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi tidaklah linear, maka persamaan regresi dapat pula dilakukan dalam bentuk fungsi non linear. Dengan demikian persamaan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penentu ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut :

$$RD = \alpha_1 \text{PDRB per kapita}^{\alpha_2} I^{\alpha_3} Ag^{\alpha_4} \dots\dots\dots(3.8)$$

Persamaan ini akan dapat dihitung dengan metode regresi setelah dilakukan transformasi dengan menggunakan logaritma sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Log RD}_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{Log PDRB per kapita}_t + \alpha_3 \text{Log I}_t + \alpha_4 \text{Log Ag}_t + \varepsilon_t \dots (3.9)$$

Penelitian ini menggunakan variabel *dummy time* untuk melihat perbedaan ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Setelah memasukan variabel *dummy time* ke dalam persamaan (3.8) maka model persamaan ketimpangan wilayah (RD) adalah sebagai berikut :

$$\text{Log RD}_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{Log PDRB per kapita}_t + \alpha_3 \text{Log I}_t + \alpha_4 \text{Log Ag}_t + \beta_1 D_t + \varepsilon_t \dots (3.10)$$

Dimana :

- RD = ketimpangan wilayah (*regional disparity*)
- PDRB per kapita = Produk Domestik Regional Bruto Per kapita
- I = Investasi (*Investment*)
- Ag = Aglomerasi (*Agglomeration*)
- D_t = *Dummy time* desentralisasi fiskal
 - Atribut 0, sebelum desentralisasi fiskal
 - Atribut 1, setelah desentralisasi fiskal
- α₁ = Intersep
- α₂- α₅ = Koefisien Variabel bebas
- β₁ = Koefisien *dummy time*
- ε = Variabel gangguan (*error term*)
- t = Waktu (data *time-series*, periode 1995-2008)

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.4.1 Multikolinearitas

Salah satu asumsi model regresi liner klasik (CLRM) adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna, dimana tidak ada hubungan linear yang benar-benar pasti diantara variabel penjelas, X, yang tercakup dalam regresi berganda. Dalam prakteknya, jarang ditemukan multikolinearitas sempurna, melainkan dengan kasus multikolinearitas dekat atau sangat tinggi dimana variabel-variabel penjelas yang diperkirakan berhubungan sering muncul dalam banyak penerapan (Gujarati,2006). Adapun indikator untuk mendeteksi mutikolinearitas dalam suatu persamaan antara lain (Gujarati, 2006):

- a. R^2 tinggi tetapi sedikit rasio t yang signifikan.

Ini merupakan gejala multikolinearitas “klasik”. Jika R^2 tinggi, misalkan 0,8, tes F di sebagian besar kasus akan menolak hipotesis nol bahwa koefisien kemiringan parsial secara tergabung atau secara serentak sama dengan nol. Tes- tes individual akan memperlihatkan bahwa tak satu pun atau sangat sedikit koefisien kemiringan parsial yang berbeda secara statistik dengan nol.

- b. Korelasi berpasangan yang tinggi dai antar variabel-variabel penjelas.

Menghitung korelasi dengan segala pasangan variabel independen. Apabila beberapa diantara korelasi ini tinggi, melebihi 0,8, ada kemungkinan terjadinya kolinearitas yang serius.

c. Pengujian korelasi parsial.

Anggap kita mempunyai tiga variabel penjelas, X_2 , X_3 , dan X_4 . Anggap r_{23} , r_{24} , dan r_{34} , mewakili korelasi berpasangan antara X_2 dan X_3 , antara X_2 dan X_4 dan antara X_3 dan X_4 , berturut-turut. Anggap $r_{23} = 0,90$, yang menunjukkan kolinearitas yang tinggi antara X_2 dan X_3 . Sekarang perhatikan koefisien korelasi, yang disebut koefisien korelasi parsial, $r_{23.4}$ yang adalah koefisien korelasi antara X_2 dan X_3 , dengan menganggap pengaruh variabel X_4 konstan. Anggap $r_{23.4} = 0,43$ yakni dengan menganggap pengaruh variabel X_4 konstan, koefisien korelasi antara X_2 dan X_3 hanya 0,43, padahal bila tidak mempertimbangkan pengaruh X_4 , nilainya 0,90. Jadi, dengan mempertimbangkan korelasi parsial ini, kita bisa katakan bahwa kolinearitas antara X_2 dan X_3 cukup tinggi.

d. Regresi subsider atau regresi tambahan (*auxiliary regression*).

Salah satu cara untuk mengetahui variabel X mana yang sangat kolinear dengan variabel-variabel X lain dalam model adalah meregresikan masing-masing variabel X terhadap variabel-variabel X yang lain dan menghitung nilai R^2 terkait. Masing-masing regresi ini disebut regresi tambahan (*Auxiliary Regression*). Apabila nilai R^2 terkait (*auxiliary*) lebih besar dari nilai R^2 model utama, maka terdapat multikolinieritas di dalam model.

e. Faktor inflasi varians (*variance inflation factor-VIF*).

Meskipun suatu model tidak berisikan beberapa variabel penjelas, nilai R^2 yang diperoleh dari berbagai regresi tambahan mungkin bukanlah petunjuk kolinearitas yang dapat diandalkan. Faktor inflasi varians (*variance inflation factor-VIF*) karena sewaktu R^2 naik, varians, dan bersamaan itu juga kesalahan standar, baik b_1 maupun b_3 , juga naik atau menanjak.

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)} \dots\dots\dots(3.11)$$

3.4.4.2 Heteroskedastisitas

Dalam Gujarati (2006) asumsi penting model regresi linear klasik (CLRM) adalah bahwa gangguan u_i yang tercakup dalam fungsi regresi populasi (PRF) bersifat homoskedastis, artinya semua memiliki varians yang sama, σ^2 . Jika tidak demikian, dimana u_i adalah σ_i^2 yang menunjukkan bervariasi dari observasi ke observasi berarti kita menganggap situasi heteroskedastisitas atau varians tak sama. Banyak cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model, salah satunya adalah dengan menggunakan Uji White (*White Test*).

Pedoman dari penggunaan model White adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai Obs*R-squared Uji White dengan nilai χ^2 tabel. Nilai Obs*R-squared yang lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

3.4.4.3 Autokorelasi

Maurice G. Kendall dan William R. Buckland dalam Gujarati (2006) mengatakan istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantara anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas sektoral). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah suatu model terdapat autokorelasi maka dilakukan Uji Breusch-Godfrey (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel pengganggu μ_i dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde ρ sebagai berikut (Imam Ghozali, 2009):

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.20)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila χ^2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$, maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

3.4.4.4 Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil (Imam Ghozali, 2009).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *test*, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Adapun rumus J-B *test* secara matematis dituliskan sebagai berikut (Gujarati, 2006) :

$$\text{J-B hitung} = \frac{n}{6} \left[S^2 + \left(\frac{k-3}{4} \right)^2 \right] \dots\dots\dots(3.12)$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

S = Kemencengan

K = Peruncingan

Selain dari nilai J-B hitung, untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual dapat diketahui dari nilai probabilitas J-B hitung. Jika nilai probabilitas dari J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal.

3.4.5 Uji Statistik

3.4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y)

yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots(3.13)$$

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2009).

3.4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H₀) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (α_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \alpha_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : \alpha_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2009). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat dari nilai probabilitas t-

statistik dari hasil regresi. Apabila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari alfa yang ditentukan ($\alpha = 5\%$) maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya, bila nilai t-statistik lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghazali, 2009). Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana F hitung dapat di penuhi dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{\hat{\beta}_1^2 \sum xi^2}{\sum ei^2 / (N-2)} \dots\dots\dots(3.14)$$

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots\dots = \alpha_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) minimal salah satu parameter tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : \text{minimal salah satu } \alpha_k \neq 0$$

Artinya variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungkan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Tata Guna Lahan

Menurut Badan Pusat Statistik (2004) Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $6^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}48'$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 1227 tahun 1989, adalah berupa daratan seluas $661,52 \text{ km}^2$ dan berupa lautan seluas $6.977,5 \text{ km}^2$. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu Kabupaten Administratif, yaitu: Kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara masing-masing dengan luas daratan seluas $145,73 \text{ km}^2$, $187,75 \text{ km}^2$, $48,20 \text{ km}^2$, $126,15 \text{ km}^2$ dan $141,88 \text{ km}^2$ serta Kabupaten Kepulauan Seribu ($11,81 \text{ km}^2$).

Luas tanah dan penggunaannya menurut kotamadya (BPS, 2006) digunakan untuk perumahan, industri, perkantoran dan penggudangan, taman, dan lainnya. Kotamadya Jakarta Selatan memiliki luas tanah 14.573 Ha . Sebagian besar lahannya

digunakan untuk perumahan yaitu seluas 10.428,44 Ha. Perkantoran dan penggudangan dalam kawasan ini seluas 1.757,50 Ha. Sedangkan untuk industri dan taman masing-masing seluas 236,08 Ha dan 190,91 Ha dan untuk lainnya seluas 1.960,07 Ha.

Serupa dengan Jakarta Selatan, sebagian besar tanah Kotamadya Jakarta Timur dimanfaatkan sebagai perumahan 13.351,00 Ha. Sedangankan untuk perkantoran dan penggudangan luas tanah yang digunakan yakni 1.997,55. Taman dan Industri seluas 262.14 Ha dan 972,44 Ha, serta 2.189,87 Ha untuk yang lainnya.

Kotamadya Jakarta Pusat memiliki luas tanah 4.790 Ha dan merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi DKI Jakarta setelah kepulauan seribu. Dimana digunakan untuk perumahan seluas 2.755,69 Ha, Industri seluas 165,74 Ha, perkantoran dan perdagangan seluas 1.123,73, untuk taman seluas 248,60, serta untuk lainnya seluas 496,24.

Penggunaan tanah di Kotamadya Jakarta Barat tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di DKI Jakarta. Dimana terbagi untuk perumahan seluas 7.464,16 Ha, industri 185,44 Ha, perkantoran dan penggudangan 1.228,89 Ha, taman 189,23 Ha, dan untuk yang lainnya seluas 3.547,47 Ha.

Kotamadya Jakarta Utara lebih terkonsentrasi untuk kegiatan perindustrian, dimana luas tanah dan penggunaannya untuk industri seluas 1.744,80 Ha paling luas diantara kotamadya dan kabupaten administratif di DKI Jakarta. Sedangkan sisanya seluas 8.119,97 Ha untuk perumahan, 1.239,89 untuk perkantoran dan penggudangan, 116,61 Ha untuk taman dan 2.978,73 untuk yang lainnya.

Pembagian wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta yang terakhir adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Wilayah ini baru memekarkan diri menjadi Kabupaten Administratif pada tahun 2002. Sebelumnya wilayah ini masuk ke dalam wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Adapun luas tanah dan penggunaannya di Kabupaten Administratif Kepulauan seribu untuk perumahan seluas 321,35 Ha, industri 275,17 Ha, perkantoran dan penggudangan seluas 92,70 Ha, dan untuk yang lainnya seluas 491,78 Ha.

Daerah di sebelah selatan dan timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai 100,52 Ha. Kedua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah resapan air, dengan iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk. Adapun wilayah Jakarta Barat masih tersedia cukup lahan untuk dikembangkan sebagai daerah perumahan. Kegiatan industri lebih banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sedangkan untuk kegiatan usaha dan perkantoran banyak terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

4.1.2 Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk DKI Jakarta selama tahun 1995-2008 rata-rata cenderung meningkat. Tahun 1995 penduduk DKI Jakarta berjumlah 7.547.245 jiwa hingga tahun 2008 mencapai 9.146.181 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di DKI Jakarta tidak hanya dikarenakan tingginya tingkat kelahiran pada wilayah ini, melainkan juga dikarenakan faktor perpindahan penduduk yang terjadi terutama yang berasal dari luar DKI Jakarta.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 1995-2008

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1995	7.547.245
1996	7.625.794
1997	7.712.571
1998	7.818.573
1999	7.831.520
2000	7.578.701
2001	7.423.379
2002	8.379.069
2003	8.603.776
2004	8.725.630
2005	8.864.519
2006	8.961.680
2007	9.057.993
2008	9.146.181

Sumber : BPS, Jakarta Dalam Angka, Beberapa Terbitan

Penduduk pada Provinsi DKI Jakarta tidak tersebar secara merata di setiap Kabupaten/Kotamadya. Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penduduk tahun 2008 paling banyak berada pada wilayah Jakarta Timur sebanyak 2.428.213 jiwa, Jakarta Barat berjumlah 2.202.672 jiwa dan Jakarta Selatan berjumlah 2.141.773 jiwa. Terkonsentrasinya penduduk pada tiga wilayah tersebut dikarenakan wilayah-wilayah ini merupakan pusat kegiatan industri, perumahan, usaha dan perkantoran.

Tabel 4.2
Penduduk DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kotamadya Tahun 2008

Kabupaten/Kota Administratif	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
Jakarta Selatan	1.072.637	1.069.136	2.141.773	100,33
Jakarta Timur	1.184.496	1.243.717	2.428.213	95,24
Jakarta Pusat	450.651	444.089	894.740	101,48
Jakarta Barat	1.067.093	1.135.579	2.202.672	93,97
Jakarta Utara	707.191	752.189	1.459.360	94,02
Kepulauan Seribu	9.324	10.099	19.423	92,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jakarta

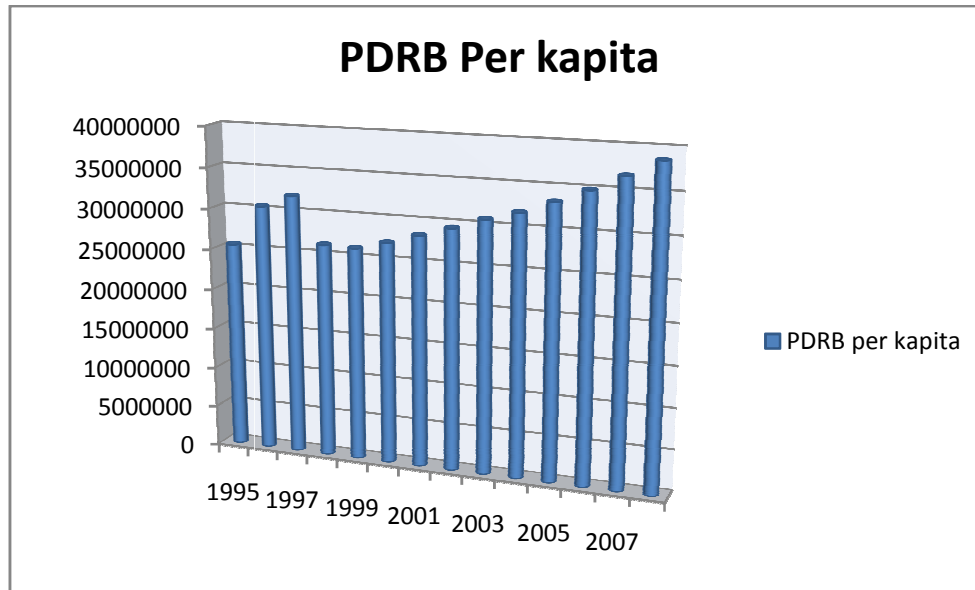
4.1.3 Kondisi Ekonomi

4.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita)

Menurut BPS (2008) Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB per kapita) adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

PDRB per kapita DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun penelitian. Peningkatan jumlah PDRB per kapita wilayah menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian dan pembangunan suatu daerah.

Gambar 4.1
PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Terbitan

Gambar 4.1 menggambarkan fluktuasi PDRB per kapita di Provinsi DKI Jakarta cenderung relatif meningkat. Pada tahun 1998 PDRB per kapita provinsi ini sempat menurun dikarenakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Penurunan ini cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah Rp. 31.929.797 menjadi Rp. 26.303.289 pada tahun 1998. Ini terjadi karena saat krisis terjadi di Indonesia membuat sektor riil tidak dapat bekerja secara optimal sehingga output yang dihasilkan pun menurun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada Indonesia saja, tetapi berdampak pula pada provinsi-provinsi di dalamnya termasuk DKI Jakarta. Hal ini tidak berlangsung lama, karena untuk tahun-tahun selanjutnya PDRB per kapita DKI Jakarta kembali meningkat dan mencapai angka Rp. 38.640.095 pada tahun 2008.

4.1.3.2 Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Investasi yang masuk baik dari pemerintah maupun pihak swasta dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat selama tahun penelitian. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ini menarik para investor khususnya pihak swasta untuk berinvestasi di Provinsi ini. Seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1999), di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Selain itu Myrdal juga menjelaskan bahwa motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba yang tinggi, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah yang lainnya menjadi terlantar. Oleh karena itu ketimpangan wilayah erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba.

Selama tahun penelitian, jumlah investasi swasta baik yang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Tabel 4.3
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 (Juta Rupiah)

Tahun	PMA	PMDN
1995	9.303.086,40	11.645.200,00
1996	10.503.072,50	14.395.500,00
1997	28.532.865,00	8.553.500,00
1998	2.444.809,99	2.319.386,44
1999	5.646.161,33	1.196.775,79
2000	12.848.350,60	1.539.893,79
2001	10.487.103,46	2.179.653,99
2002	8.101.095,37	1.766.094,69
2003	23.831.475,90	4.425.406,42
2004	12.683.696,59	3.731.198,56
2005	32.157.294,37	2.545.990,29
2006	13.278.011,06	3.088.034,76
2007	44.051.370,64	4.218.004,21
2008	96.003.214,44	1.837.340,38

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah investasi swasta yang masuk ke DKI Jakarta mengalami fluktuasi pada tahun penelitian. Pada tahun 1995-1997 jumlah PMA yang masuk ke DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan PMDN tahun 1995 dan 1996 meningkat dari Rp. 11.645.200,00 (dalam juta) menjadi Rp. 14.395.500,00 (dalam juta). Akan tetapi ketika terjadi krisis tahun 1998 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat tajam hingga mencapai -17,49 %, hal ini pun berdampak pada jumlah investasi swasta yang ikut turun. Investasi mengalami penurunan dikarenakan pada waktu krisis perekonomian berada pada kondisi yang tidak stabil. Akan tetapi sering dengan perbaikan perekonomian, kembali meningkatkan jumlah investasi swasta. Ini terbukti dengan

jumlah PMA pada tahun 2008 sebesar Rp. 96.003.214,44 (dalam juta). Sedangkan jumlah PMDN memang tidak sebesar jumlah PMA yang masuk pada wilayah ini dan cenderung fluktuatif, akan tetapi secara kumulatif jumlah investasi swasta yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta relatif meningkat.

4.1.3.3 Aglomerasi

Aglomerasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Menurut Marshall dalam Kuncoro (2004), aglomerasi muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatannya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut.

DKI Jakarta yang sebagian wilayahnya digunakan untuk sektor industri juga akan diuntungkan dengan adanya aglomerasi. Industri-industri yang berada di wilayah DKI Jakarta yang terletak sebagian besar di Jakarta Utara dan Jakarta timur diuntungkan dengan adanya aglomerasi karena membuat terkonsentrasinya kegiatan perekonomian pada wilayah tersebut dan akan menghemat biaya produksi sehingga akan lebih menguntungkan bagi industri-industri yang terkait. Aglomerasi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Di lain pihak terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Selama masa penelitian tingkat aglomerasi tertinggi di DKI Jakarta terjadi pada tahun 1997 sebesar 0,177 persen dan terendah pada tahun 2008 sebesar 0,071 persen. Wilayah yang memiliki kekuatan aglomerasi yang tinggi akan

mendorong pembangunan wilayah tersebut melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, bagi wilayah lain yang aglomasinya relatif rendah akan mendorong munculnya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, adanya aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah.

Tabel 4.4
Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 1995-2008

Tahun	Aglomerasi	Ketimpangan Wilayah
1995	0.174397	2.660
1996	0.176462	3.120
1997	0.177147	3.193
1998	0.168251	2.994
1999	0.166449	2.986
2000	0.165518	2.999
2001	0.165822	3.090
2002	0.166309	3.125
2003	0.16715	3.167
2004	0.168139	3.158
2005	0.168647	3.185
2006	0.093683	3.209
2007	0.084311	3.222
2008	0.071364	3.241

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

4.2 Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih unggul atau maju dibandingkan

daerah lainnya. Ketimpangan biasanya terjadi antara lain ketimpangan regional yang meliputi ketimpangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), ketimpangan antardaerah, dan ketimpangan intradaerah. Pada penelitian ini cakupan objek penelitian adalah ketimpangan antardaerah (Armida S. Alisjahbana, 2005). Menurut Armida S. Alisjahbana (2005) ketimpangan atau kesenjangan antardaerah di provinsi-provinsi terjadi karena konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di Pulau Jawa dan Bali.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia masih memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi selama masa penelitian mulai tahun 1995-2008. Tingkat ketimpangan pada provinsi ini diukur dengan menggunakan pengukuran PDRB per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu digunakan oleh Jaime Bonet (2006). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta masih tinggi dan cenderung meningkat pada masa penelitian.

Tabel 4.5
Tingkat Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008

Tahun	Ketimpangan	Pertumbuhan Ekonomi
1995	2,660	9,27
1996	3,120	9,1
1997	3,193	5,11
1998	2,994	-17,49
1999	2,986	-0,29
2000	2,999	4,33
2001	3,090	3,64
2002	3,125	4,89
2003	3,167	5,31
2004	3,158	5,65
2005	3,185	6,01
2006	3,209	5,59
2007	3,222	6,44
2008	3,241	6,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa ketimpangan yang terjadi di DKI Jakarta relatif tinggi dan meningkat hampir setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 1998 ketimpangan ini berkurang dari 3,193 pada tahun 1997 menjadi 2,994. Hal ini disebabkan karena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Krisis ekonomi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menurun bahkan sampai -17,49 % dan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Penurunan tingkat ketimpangan wilayah ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2001 ketimpangan mulai meningkat kembali seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Wijayanti (2004) dimana terjadi

penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia pada waktu krisis tahun 1998. Ini dikarenakan adanya penurunan tingkat pertumbuhan khususnya di Pulau Jawa.

Ketimpangan wilayah yang terjadi di DKI Jakarta ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Myrdal (Jhingan, 1993) dalam teorinya mengenai dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*) mengemukakan bahwa dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar yang semakin mengecil membuat ketimpangan wilayah di negara-negara terbelakang.

4.3 Pembuktian Hipotesis Kuznets

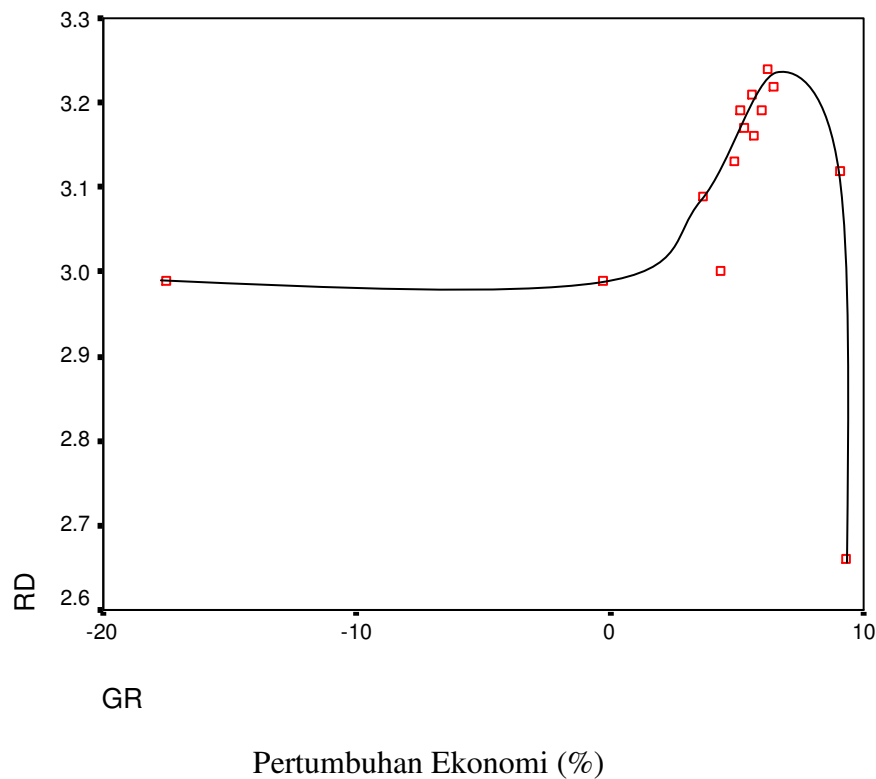
Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cenderung meningkat pada tahun penelitian. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi wilayah ini sempat turun hingga -17,49 % akibat dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akan tetapi, laju pertumbuhan tersebut kembali meningkat untuk tahun selanjutnya. Disisi lain, tingkat ketimpangan DKI Jakarta pada tahun 1995-1997 yang meningkat tiap tahunnya ikut menurun akibat dari krisis ekonomi yang terjadi walaupun kembali naik pada tahun 2001.

Seiring dengan Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik dimana menjelaskan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Penelitian ini ingin mengetahui apakah hipotesis Kuznet tersebut berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Melihat pertumbuhan

ekonomi DKI Jakarta yang cenderung meningkat diharapkan dapat terjadi secara merata.

Gambar 4.2
Kurva Hubungan Antara Indeks Ketimpangan Wilayah dengan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 1995-2008

Ketimpangan Wilayah



Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

Gambar 4.2 merupakan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi. Gambar menunjukkan bahwa kurva berbentuk U terbalik. Pada tahun 1995-1997 indeks ketimpangan pembangunan wilayah terus meningkat. Akan tetapi seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi wilayah DKI Jakarta pada tahun 1998

dikarenakan krisis ekonomi, indeks ketimpangan pembangunan wilayah ikut menurun dan kembali meningkat pada tahun 2001 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah sehingga dapat dikatakan ada *trade off* antara ketidakmerataan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil dari analisis korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif didapatkan nilai 0,143. Nilai positif ini menandakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan wilayah di DKI Jakarta. Akan tetapi dari hasil regresi menunjukkan tingkat signifikansi 0,312 yang berarti secara statistik korelasi ini kurang kuat karena tidak signifikan pada $\alpha = 5 \%$.

4.4 Analisis Data

Data mentah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 1995-2008. Dalam periode ini terdapat perubahan tahun dasar pada data Produk Domestik Bruto per kapita, dimana tahun 1995-2001 menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 dan 2002-2008 menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2008. Oleh karena itu, agar data tersebut dapat diolah tanpa adanya kerancuan, maka dilakukan penyamaan tahun dasar menjadi PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000.

Menurut Badan Pusat Statistik, penyamaan tahun dasar ini dilakukan dengan mencari jumlah PDRB per kapita yang dihitung dengan menggunakan dua tahun dasar, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 tahun 2001 dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001. Jika ingin menjadikan tahun dasar 2000 maka terlebih dahulu dapatkan *magic number*, yaitu dengan data tahun 2001 menurut tahun dasar 2000 dibagi dengan data tahun 2001 menurut tahun dasar 1993. *Magic number* tersebut kemudian dikalikan dengan semua data yang diukur dengan tahun dasar 1993 sehingga data tersebut berubah menjadi tahun dasar 2000. Setelah semua data sudah memiliki tahun dasar yang sama maka data tersebut baru bisa diolah dan tidak akan menimbulkan kerancuan.

4.4.1 Pengujian Model Asumsi Klasik

Pada regresi model utama diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Regresi Utama

Variabel Dependen: LOG (RD)					
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.	Keterangan
LOG (PDRB per kapita)	0,665312	0,134215	4,957052	0,0008	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
LOG (I)	-0,038387	0,014461	-2,654473	0,0263	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
LOG (Ag)	0,080914	0,034246	2,362687	0,0424	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
Dt	-0,005169	0,018527	-0,278977	0,7866	Tidak Signifikan
C	-9,003771	1,977532	-4,553035	0,0014	
		R-squared		0,845769	
F-statistic	12,33849	Prob(F-statistic)		0,001068	
		Durbin-Watson stat		1,261625	
		Obs*R-squared White Test		8,204877	
		Obs*R-squared BG Test		12,71898	

Sumber : Data diolah, 2010

4.4.1.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel independen (variabel penjelas). Dalam prakteknya multikolinearitas sempurna jarang ditemukan, melainkan dengan kasus multikolinearitas dekat, tinggi, atau tak sempurna. Ada beberapa indikator untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model. Penelitian ini menggunakan indikator pengujian regresi parsial (*auxiliary regression*) untuk mendeteksi multikolinearitas, yaitu dengan membandingkan R^2 *auxiliary regression* dengan R^2 pada model utama. Pertama, lakukan regresi diantara variabel-variabel independen (penjelas). Setelah itu,

akan didapatkan nilai R^2 *auxiliary*. Jika nilai R^2 *auxiliary* lebih besar dari R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.7
Auxiliary Regression

Regresi	R^{2*}	R^2
LOG (PDRB per kapita) = $f(\text{LOG I, LOG Ag, Dt})$	0.850779	0,845769
LOG (I) = $f(\text{LOG PDRB per kapita, LOG Ag, Dt})$	0.659827	0,845769
LOG (Ag) = $f(\text{LOG PDRB per kapita, LOG I, Dt})$	0.602833	0,845769
Dt = $f(\text{LOG PDRB per kapita, LOG I, LOG Ag})$	0.501099	0,845769

Sumber: Data diolah, 2010

R^{2*} = R^2 hasil *auxiliary regression*

R^2 = R^2 hasil regresi utama

Tabel 4.7 hasil pengujian *auxiliary regression* diperoleh bahwa terdapat nilai R^2 *auxiliary* yang lebih besar dari nilai R^2 model utama sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolineritas pada model penelitian. Oleh karena itu, dilakukan pengujian lain untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas yaitu menggunakan cara melihat koefisien korelasi antar variabel. Apabila koefisien korelasi di bawah angka 0,8 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas sempurna. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model penelitian.

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi Antar Variabel

	Log(PDRB per kapita)	Log(I)	Log(Ag)	Dt
Log(PDRB per kapita)	1.000000	0.780659	-0.770400	0.657056
Log(I)	0.780659	1.000000	-0.558076	0.355188
Log(Ag)	-0.770400	-0.558076	1.000000	-0.476017
Dt	0.657056	0.355188	-0.476017	1.000000

Sumber : Data diolah, 2010

4.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan *disturbance* yang dapat ditunjukkan dengan adanya *conditional variance* Y_i bertambah pada waktu X bertambah. Dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi dari semestinya dan menyesatkan.

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model digunakan Uji White. Hasil Uji White dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Uji White

χ^2 tabel	Obs*R-squared
21,0261	8,204877

Sumber : Data diolah, 2010

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai Obs*R-squared Uji White dengan nilai χ^2 tabel. Nilai Obs*R-squared yang lebih kecil

dibandingkan nilai χ^2 tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Pada model penelitian, dengan $n= 14$, maka diperoleh *degree of freedom* (df) = 12 pada $\alpha =5\%$. Nilai χ^2 tabel sebesar 21,0261, dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared dari hasil regresi Uji White sebesar 8,204877. Nilai Obs*R-squared Uji White lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan tersebut bebas heteroskedastisitas.

4.4.1.3 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah suatu model terdapat autokorelasi maka dilakukan Uji Breusch-Godfrey (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel pengganggu μ_i dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde ρ sebagai berikut (Imam Ghazali, 2009):

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.20)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \dots \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila χ^2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared, maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.10
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test

χ^2 tabel	Obs*R-squared
21,0261	12,71898

Sumber : Data diolah, 2010

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai χ^2 tabel lebih besar dari nilai Obs*R-squared, ini berarti bahwa model penelitian bebas dari autokolerasi.

4.4.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan melihat nilai *Jarque Bera* dihitung dengan nilai probabilitasnya. Dimana jika probabilitasnya lebih besar dari alpha 0,05 maka uji normalitas diterima atau dengan kata lain bahwa residul u_t terdistribusi normal. Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.11
Uji Jarque-Berra

J-B hitung	Prob
1,094027	0,5478675

Sumber: Data diolah, 2010

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas J-B hitung persamaan lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa residul u_t terdistribusi normal.

4.4.2 Pengujian Statistik Analisis Regresi

4.4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil regresi dari tabel 4.6 menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,845769. Ini berarti bahwa sebesar 84,58% variasi ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan dari variasi ke empat variabel independen yaitu PDRB per kapita (Y), investasi swasta (I), aglomerasi (Ag), serta dummy desentralisasi fiskal (Dt).

4.4.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau probabilitas F lebih kecil dari 5 % ($\alpha = 5\%$) maka variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai dari F hitung adalah 12,33849 dengan probabilitas sebesar 0.001068 lebih kecil dari alpha 5 % ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti variabel independen PDRB per kapita (Y), investasi swasta (I), aglomerasi (Ag), dan dummy desentralisasi (Dt) dapat mempengaruhi secara signifikan variabel dependen ketimpangan wilayah.

4.4.2.3 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi t-statistik. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Tabel 4.12
Uji Statistik t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.	Keterangan
LOG (PDRB per kapita)	0,665312	0,134215	4,957052	0,0008	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
LOG (I)	-0,038387	0,014461	-2,654473	0,0263	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
LOG (Ag)	0,080914	0,034246	2,362687	0,0424	Signifikan pada $\alpha= 5\%$
Dt	-0,005169	0,018527	-0,278977	0,7866	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah, 2010

Tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa pada alpha 5 % ($\alpha= 5\%$) variabel independen PDRB per kapita (PDRB per kapita), Investasi Swasta (I), Aglomerasi (Ag) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Sedangkan variabel Dummy Desentralisasi Fiskal (Dt) tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel ketimpangan wilayah karena memiliki probabilitas sebesar 0,7866 lebih besar dari alpha 5%.

4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Pengaruh PDRB perkapita, Investasi, Aglomerasi, Dummy Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008. Variabel dependen yang digunakan adalah ketimpangan wilayah, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDRB per kapita, investasi swasta, aglomerasi, serta dummy desentralisasi fiskal.

Tiga dari empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PDRB per kapita, investasi swasta, dan aglomerasi signifikan pada alpha 5%. Sedangkan variabel dummy yang menjelaskan desentralisasi fiskal tidak signifikan, hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari alpha 5 persen. Adapun hasil regresi persamaan yang diolah menggunakan Eviews 6.0 secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log RD}_t = & -9,003771 + 0,665312 \text{ Log (PDRB per kapita}_t) - 0,038387 \text{ log(I}_t) + \\ & (0,0014)^* \quad (0,0008)^* \quad (0,0263)^* \\ & 0,080914 \text{ Log(Ag}_t) - 0,005169 \text{ Dt} \\ & (0,0424)^* \quad (0,7866) \end{aligned}$$

* = Signifikansi pada alpha 5% ($\alpha = 5\%$)

Interpretasi hasil regresi pengaruh dari PDRB per kapita, Investasi Swasta, Aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008 adalah sebagai berikut :

a. PDRB per kapita

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0008 lebih kecil dari alpha 5%. Kenaikan 1 persen PDRB per kapita akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0,665312 persen. Hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga terdapat hubungan negatif dan signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah.

Hubungan positif yang terjadi antara PDRB per kapita dan ketimpangan wilayah bisa disebabkan karena kenaikan pendapatan per kapita masyarakat di Provinsi DKI Jakarta belum terjadi secara merata. Negara-negara berkembang dalam perekonomian lebih menekankan pada penggunaan modal dibandingkan penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Hasil ini pun tidak sesuai dengan Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal,2008) yang mengatakan pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun. Tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta sempat menurun pada tahun 1998-2000, akan tetapi ketimpangan tersebut

kembali meningkat hingga tahun 2008. Kenaikan PDRB per kapita pada periode penelitian ternyata tidak diiringi penurunan ketimpangan wilayah di DKI Jakarta.

Tabel 4.13
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah) dan Ketimpangan Wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008

Tahun	PDRB Per kapita	Ketimpangan
1995	25461630	2.660
1996	30427152	3.120
1997	31929797	3.193
1998	26303289	2.994
1999	26185625	2.986
2000	27160405	2.999
2001	28314128	3.090
2002	29461122	3.125
2003	30774575	3.167
2004	31832209	3.158
2005	33324813	3.185
2006	34901161	3.209
2007	36733180	3.222
2008	38640095	3.241

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, diolah

Begitu pula jumlah PDRB per kapita pada setiap Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta belum tersebar secara merata. Tabel 4.14 menunjukkan jumlah PDRB per kapita setiap kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2007. Dari tabel 4.14 rata-rata PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta cenderung tinggi akan tetapi hanya terpusat pada beberapa wilayah saja, diantaranya Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal ini menunjukkan bahwa laju PDRB per kapita yang tinggi pada wilayah ini hanya dihasilkan dan dinikmati oleh beberapa wilayah.

Tabel 4.14
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah) Menurut
Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Kabupaten/Kotamadya	PDRB Per kapita
2003	Jakarta Selatan	31.653.808
	Jakarta Timur	17.797.603
	Jakarta Pusat	76.338.074
	Jakarta Barat	19.847.328
	Jakarta Utara	34.504.651
	Kepulauan Seribu	53.346.083
2004	Jakarta Selatan	32.928.834
	Jakarta Timur	18.391.668
	Jakarta Pusat	79.832.142
	Jakarta Barat	20.642.801
	Jakarta Utara	35.967.529
	Kepulauan Seribu	57.268.456
2005	Jakarta Selatan	33.052.272
	Jakarta Timur	19.053.623
	Jakarta Pusat	88.024.058
	Jakarta Barat	21.053.815
	Jakarta Utara	37.591.086
	Kepulauan Seribu	53.346.083
2006	Jakarta Selatan	33.973.279
	Jakarta Timur	22.143.815
	Jakarta Pusat	90.301.151
	Jakarta Barat	21.494.447
	Jakarta Utara	39.341.352
	Kepulauan Seribu	53.840.391
2007	Jakarta Selatan	35.406.195
	Jakarta Timur	23.439.070
	Jakarta Pusat	96.382.745
	Jakarta Barat	22.927.233
	Jakarta Utara	41.367.555
	Kepulauan Seribu	54.295.203

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian ditolak.

b. Investasi

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0263 lebih kecil dari alpha 5%. Kenaikan 1 persen Investasi swasta akan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. Hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara Investasi dengan ketimpangan wilayah.

Teori Myrdal yang mengatakan bahwa adanya perpindahan modal dan motif laba yang cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah tidak terbukti di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993) motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Akan tetapi dari hasil regresi menunjukkan hubungan negatif yang terjadi antara investasi swasta dengan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sadono Sukirno, 1985). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Budiantoro Hartono (2008) juga menghasilkan hubungan negatif antara investasi swasta dengan ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam penelitiannya Budiantoro mengemukakan bahwa setiap peningkatan investasi swasta yang berarti

peningkatan penanaman modal maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran sehingga ketimpangan akan berkurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi swasta berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian ditolak.

c. Aglomerasi

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0424 lebih kecil dari alpha 5%. Kenaikan 1 persen Aglomerasi akan meningkatkan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,080914 persen. Hal ini disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi di DKI Jakarta yang mendorong pertumbuhan daerah cenderung lebih cepat. Sedangkan bagi wilayah lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) berjudul Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Regional : Bukti dari Pengalaman Kolombia. Dalam penelitiannya Bonet menggunakan variabel independen desentralisasi fiskal dan variabel control yang terdiri dari aglomerasi produksi dan keterbukaan perdagangan. Penelitian Bonet juga menghasilkan

hubungan yang positif antara aglomerasi produksi dengan ketimpangan pendapatan regional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

d. *Dummy Time* Desentralisasi Fiskal

Dummy time desentralisasi fiskal dalam penelitian dipilih untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah ditemukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Variabel dummy dituliskan dengan angka 0 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sebelum desentralisasi fiskal dan angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan setelah desentralisasi fiskal. Hasil regresi menunjukkan bahwa dummy desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta baik sebelum dan setelah desentralisasi fiskal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta diukur dengan menggunakan Pendekatan PDRB per kapita relatif selama periode penelitian tahun 1995-2008 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998-2000 ketimpangan wilayah pada Provinsi ini mengalami penurunan akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi untuk tahun selanjutnya ketimpangan kembali melebar.
2. Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI Jakarta. Pada pertumbuhan awal ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta memburuk, kemudian pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun. Akan tetapi, suatu waktu ketimpangan tersebut akan kembali meningkat sehingga terbukti bahwa terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan.
3. Model regresi pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan

melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

4. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,845769. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 84,58 persen variasi variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independen yakni PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan *dummy time* desentralisasi fiskal.
5. Uji F-statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi yaitu PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi serta *dummy time* desentralisasi fiskal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen ketimpangan wilayah .
6. Dari hasil regresi PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0008 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,665312 persen. Pengaruh positif ini dikarenakan tidak meratanya Pendapatan per kapita yang diterima oleh seluruh masyarakat. Hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan peningkatan pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta.
7. Variabel independen kedua yaitu investasi berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,0263 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti kenaikan investasi swasta sebesar 1

persen akan mengurangi ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. Peningkatan investasi yang terjadi di DKI Jakarta membuat kegiatan ekonomi semakin tumbuh dan berujung pada kemakmuran. Oleh karena itu, selama periode penelitian investasi yang bertambah mempengaruhi pengurangan ketimpangan wilayah di DKI Jakarta.

8. Aglomerasi berhubungan positif dan signifikan sebesar 0,0424 pada $\alpha = 5\%$, dimana kenaikan tingkat aglomerasi 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,080914 persen. Hal ini dikarenakan dengan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah membuat wilayah yang memiliki konsentrasi ekonomi rendah menjadi terbelakang. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat aglomerasi menyebabkan ketimpangan wilayah. Sedangkan variabel *dummy time* desentralisasi tidak signifikan, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat ketimpangan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah tahun penelitian yang relatif singkat (14 tahun). Selain itu, model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, *dummy time* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti faktor migrasi, perdagangan, pengangguran dan prasarana perhubungan guna menunjang mobilitas barang dan faktor produksi. Oleh karenanya diperlukan studi

lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan ketimpangan wilayah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, didapatkan tingkat ketimpangan yang cenderung meningkat dan tinggi selama periode penelitian. Melihat keadaan tersebut hendaknya dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah. Hal tersebut dimulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi semakin tingginya ketimpangan wilayah. Hasil penelitian PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, ini dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta tidak terjadi secara merata pada seluruh penduduk, sehingga dibutuhkan usaha-usaha untuk pemerataan Pendapatan per kapita, misalkan dengan membatasi jumlah penduduk yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Penduduk pada wilayah DKI Jakarta tidak hanya berasal dari jumlah penduduk yang lahir tetapi juga dikarenakan adanya perpindahan penduduk dari luar wilayah DKI Jakarta. Semakin banyak jumlah penduduk yang masuk ke wilayah ini tanpa adanya tujuan yang jelas akan menimbulkan ketidakmerataan dan pengangguran. Selain itu untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi

program Keluarga Berencana (KB). Optimalisasi program KB ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk yang lahir sehingga jumlah penduduk DKI Jakarta tidak terus bertambah. Cara lain untuk pemerataan pendapatan per kapita masyarakat yaitu dengan peningkatan penyediaan lapangan kerja sehingga pengangguran pun dapat dikurangi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga wilayah lain tetap terbelakang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini dapat memberikan dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah saja.
3. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ketimpangan regional sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di DKI Jakarta. Sebab dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan. Jika hal ini dapat dilakukan, maka pembangunan daerah dapat terlaksana secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peran dari Kabupaten/Kotamadya yang lebih besar serta koordinasi dari pemerintah pusat agar setiap Kabupaten/Kotamadya tidak berdiri sendiri sehingga tidak terjadi gap antar wilayah yang terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini. Hidayati dan Mudrajad Kuncoro. 2004. *Konsentrasi Geografis Industri Manufaktur di Greater Jakarta dan Bandung Periode 1980-2000 : Menuju Satu Daerah Aglomerasi?*. Diakses Tanggal 2 September 2010. dari http://www.mudrajad.com/upload/journal_amini-aglomerasi.pdf
- Anto. Dajan. 1991. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Armida S. Alisjahbana. 2005. *Kesenjangan Regional di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU. Diakses Tanggal 13 Januari 2010. dari
- Arsyad.Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DKI Jakarta Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *PMA dan PMDN menurut Lokasi Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DKI Jakarta Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Indonesia Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta Berbagai Tahun Terbitan*. Jakarta

- Badan Pusat Statistik. *Jakarta Dalam Angka 2004-2005*. Diakses tanggal 3 agustus 2010. Dari http://jakarta.bps.go.id/JDA/JDA2004-2005/bab3_tables.html
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2009. *Data PMA dan PMDN yang Telah Direalisasikan Tahun 1998-2009*. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Bonet. Jaime. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from The Colombian Experience. Original Paper*. Ann Reg Sci 40:661-676
- Diana, Wijayanti. 2004. *Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia, 1992-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 9, No. 2, Hal: 129-142
- Imam. Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Gujarati. Damodar. 2006 *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Gujarati. Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Gujarati. Damodar and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill International Edition
- Hartono. Budiantoro. 2008. *Tesis Analisa Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tesis Dipublikasikan*. Diakses Tanggal 4 Agustus 2010. Dari http://eprints.undip.ac.id/16862/1/BUDIANTORO_HARTONO.pdf
- Jhingan. ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Lessmann.Christian. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Approach for OECD Countries.Ifo Working Paper No.25*
- Lili, Masli. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Diakses tanggal 3 Maret 2010. Dari <http://www.stanim.ac.id/jsma/pdf/vol1/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI%20DAN%20KETIMPANGAN%20REGIONAL%20ANTAR%20KABUPATEN-KOTA%20DI%20PROPINSI%20JAWA%20BARAT.pdf>
- Mudrajad. Kuncoro. 2002. *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi. Perencanaan. Strategi. dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mudrajad Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori.Masalah.dan kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mulyanto. Sudarmono. 2006. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng. Tesis Dipublikasikan*. Diakses Tanggal 18 September 2010. Dari http://eprints.undip.ac.id/15738/1/Mulyanto_Sudarmono.pdf
- RM. Riadi. *Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau*. Diakses tanggal 17 September 2010. Dari <http://rmriadi.yolasite.com/resources/Jurnal%20Pertumbuhan%20dan%20Ketimpangan.pdf>
- Sadono. Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika. Jakarta

- Sigalingging Atur J. 2008. *Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah. Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Fakultas Ekonomi Undip. Semarang
- Sihombing. Kartini H. 2008. *Pengaruh Aglomerasi. Modal. Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Demak. Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Fakultas Ekonomi Undip. Semarang
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Baduose Media. Padang Sumatera Barat
- Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000.* Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang
- Tarigan. Robinson. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Bumi Aksara. Jakarta
- Todaro.M. dan Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Pearson Education Limited. United Kingdom

LAMPIRAN A :
DATA

Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Menggunakan Pendekatan PDRB per kapita Relatif

Tahun	PDRB Per kapita	PDRB Per kapita Indonesia	RD
1995	25461630	6957368	2.659664
1996	30427152	7384789	3.120246
1997	31929797	7614630	3.193217
1998	26303289	6584897	2.994488
1999	26185625	6568997	2.986244
2000	27160405	6791346	2.999267
2001	28314128	6922888	3.08993
2002	29461122	7142654	3.124674
2003	30774575	7385472	3.166907
2004	31832209	7655535	3.158065
2005	33324813	7963600	3.184642
2006	34901161	8292500	3.208762
2007	36733180	8700000	3.222205
2008	38640095	9111100	3.240991

$$\text{Ketimpangan Wilayah (RD)} = \left| \frac{PDRB_{p.c\ it}}{PDB_{p.c\ Nal,t}} - 1 \right|$$

Tingkat Aglomerasi Produksi Provinsi DKI Jakarta

Tahun	PDRB DKI	PDRB Indonesia	Aglomerasi
1995	2.35973E+14	1.35309E+15	0.174396516
1996	2.57436E+14	1.45887E+15	0.176462068
1997	2.70581E+14	1.52744E+15	0.177147246
1998	2.23258E+14	1.32694E+15	0.168250554
1999	2.22614E+14	1.33743E+15	0.166449053
2000	2.32261E+14	1.40324E+15	0.165517879
2001	2.40719E+14	1.45166E+15	0.165822415
2002	2.50331E+14	1.50522E+15	0.166309082
2003	2.63624E+14	1.57717E+15	0.167150038
2004	2.78525E+14	1.65652E+15	0.168138845
2005	2.95271E+14	1.75082E+15	0.168647464
2006	3.12827E+14	3.33922E+15	0.09368266
2007	3.32971E+14	3.94932E+15	0.084311004
2008	3.53539E+14	4.95403E+15	0.071363947

$$\text{Aglomerasi} = \frac{PDRB_i}{PDRB_{tot}}$$

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1995	9.27
1996	9.10
1997	5.11
1998	-17.49
1999	-0.29
2000	4.33
2001	3.64
2002	4.89
2003	5.31
2004	5.65
2005	6.01
2006	5.59
2007	6.44
2008	6.18

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Data Regresi

Tahun	RD	PDRB Per kapita	I	Ag	Dt
1995	2.659664	25461630	2.09483E+13	0.174397	0
1996	3.120246	30427152	2.48986E+13	0.176462	0
1997	3.193217	31929797	3.70864E+13	0.177147	0
1998	2.994488	26303289	4.7642E+12	0.168251	0
1999	2.986244	26185625	6.84294E+12	0.166449	0
2000	2.999267	27160405	1.43882E+13	0.165518	0
2001	3.08993	28314128	1.26668E+13	0.165822	1
2002	3.124674	29461122	9.86719E+12	0.166309	1
2003	3.166907	30774575	2.82569E+13	0.16715	1
2004	3.158065	31832209	1.64149E+13	0.168139	1
2005	3.184642	33324813	3.47033E+13	0.168647	1
2006	3.208762	34901161	1.6366E+13	0.093683	1
2007	3.222205	36733180	4.82694E+13	0.084311	1
2008	3.240991	38640095	9.78406E+13	0.071364	1

LAMPIRAN B :
HASIL REGRESI
UTAMA

Hasil Regresi Utama

Dependent Variable: LOG(RD)

Method: Least Squares

Date: 09/03/10 Time: 00:24

Sample: 1995 2008

Included observations: 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB per kapita)	0.665312	0.134215	4.957052	0.0008
LOG(I)	-0.038387	0.014461	-2.654473	0.0263
LOG(AG)	0.080914	0.034246	2.362687	0.0424
DT	-0.005169	0.018527	-0.278977	0.7866
C	-9.003771	1.977532	-4.553035	0.0014
R-squared	0.845769	Mean dependent var	1.129047	
Adjusted R-squared	0.777222	S.D. dependent var	0.051338	
S.E. of regression	0.024231	Akaike info criterion	-4.329883	
Sum squared resid	0.005284	Schwarz criterion	-4.101648	
Log likelihood	35.30918	Hannan-Quinn criter.	-4.351010	
F-statistic	12.33849	Durbin-Watson stat	1.261625	
Prob(F-statistic)	0.001068			

LAMPIRAN C :
UJI ASUMSI KLASIK
MULTIKOLINEARITAS
HETEROSKEDASTISITAS
AUTOKORELASI
UJI NORMALITAS

Multikoleniaritas

1. Auxiliary Regression

$$\text{Log (PDRB per kapita)} = f(\text{Log I, Log Ag, dt})$$

Dependent Variable: LOG(PDRB per kapita)

Method: Least Squares

Date: 09/19/10 Time: 07:59

Sample: 1995 2008

Included observations: 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(I)	0.076067	0.024131	3.152221	0.0103
LOG(AG)	-0.148415	0.065635	-2.261204	0.0473
DT	0.081090	0.035327	2.295400	0.0446
C	14.57420	0.684456	21.29312	0.0000
R-squared	0.850779	Mean dependent var		17.23573
Adjusted R-squared	0.806013	S.D. dependent var		0.129625
S.E. of regression	0.057092	Akaike info criterion		-2.653342
Sum squared resid	0.032595	Schwarz criterion		-2.470754
Log likelihood	22.57339	Hannan-Quinn criter.		-2.670244
F-statistic	19.00489	Durbin-Watson stat		1.427520
Prob(F-statistic)	0.000187			

Log (I) = f (Log PDRB per kapita, Log Ag,Dt)

Dependent Variable: LOG(I)
Method: Least Squares
Date: 09/19/10 Time: 07:34
Sample: 1995 2008
Included observations: 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB per kapita)	6.552223	2.078605	3.152221	0.0103
LOG(AG)	0.326884	0.741708	0.440718	0.6688
DT	-0.441226	0.380360	-1.160023	0.2730
C	-81.43351	34.73956	-2.344115	0.0411
R-squared	0.659827	Mean dependent var	30.61608	
Adjusted R-squared	0.557775	S.D. dependent var	0.796804	
S.E. of regression	0.529875	Akaike info criterion	1.802604	
Sum squared resid	2.807673	Schwarz criterion	1.985192	
Log likelihood	-8.618229	Hannan-Quinn criter.	1.785702	
F-statistic	6.465590	Durbin-Watson stat	1.842559	
Prob(F-statistic)	0.010432			

Log (Ag) = f (Log PDRB per kapita, Log I,Dt)

Dependent Variable: LOG(AG)

Method: Least Squares

Date: 09/19/10 Time: 07:35

Sample: 1995 2008

Included observations: 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB per kapita)	-2.279556	1.008116	-2.261204	0.0473
LOG(I)	0.058287	0.132255	0.440718	0.6688
DT	0.057305	0.170118	0.336857	0.7432
C	35.54330	14.39120	2.469794	0.0331
R-squared	0.602833	Mean dependent var	-1.929247	
Adjusted R-squared	0.483683	S.D. dependent var	0.311390	
S.E. of regression	0.223750	Akaike info criterion	0.078383	
Sum squared resid	0.500641	Schwarz criterion	0.260971	
Log likelihood	3.451321	Hannan-Quinn criter.	0.061481	
F-statistic	5.059444	Durbin-Watson stat	1.106304	
Prob(F-statistic)	0.021863			

Dt = f (Log PDRB per kapita, Log I, Log Ag)

Dependent Variable: DT
 Method: Least Squares
 Date: 09/19/10 Time: 07:36
 Sample: 1995 2008
 Included observations: 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB per kapita)	4.255418	1.853889	2.295400	0.0446
LOG(I)	-0.268808	0.231727	-1.160023	0.2730
LOG(AG)	0.195793	0.581233	0.336857	0.7432
C	-64.16623	26.97252	-2.378948	0.0387
R-squared	0.501099	Mean dependent var	0.571429	
Adjusted R-squared	0.351428	S.D. dependent var	0.513553	
S.E. of regression	0.413584	Akaike info criterion	1.307045	
Sum squared resid	1.710519	Schwarz criterion	1.489633	
Log likelihood	-5.149315	Hannan-Quinn criter.	1.290143	
F-statistic	3.348015	Durbin-Watson stat	0.863316	
Prob(F-statistic)	0.063844			

2. Koefisien Korelasi

	LOG(PDRB per kapita)	LOG(I)	LOG(AG)	DT
LOG(PDRB per kapita)	1.000000	0.780659	-0.770400	0.657056
LOG(I)	0.780659	1.000000	-0.558076	0.355188
LOG(AG)	-0.770400	-0.558076	1.000000	-0.476017
DT	0.657056	0.355188	-0.476017	1.000000

Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

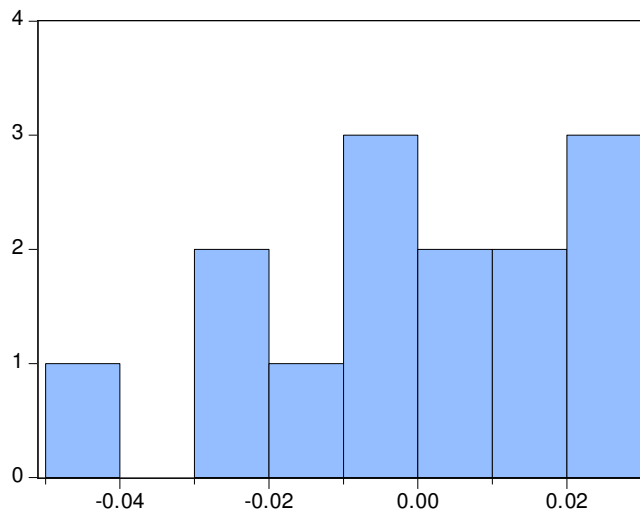
F-statistic	3.185605	Prob. F(4,9)	0.0687
Obs*R-squared	8.204877	Prob. Chi-Square(4)	0.0844
Scaled explained SS	2.970482	Prob. Chi-Square(4)	0.5628

Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.964407	Prob. F(6,3)	0.1082
Obs*R-squared	12.71898	Prob. Chi-Square(6)	0.0477

Uji Normalitas



Series: Residuals
Sample 1995 2008
Observations 14

Mean 7.61e-16
Median 0.000894
Maximum 0.024616
Minimum -0.044621
Std. Dev. 0.020162
Skewness -0.673427
Kurtosis 2.752088

Jarque-Bera 1.094027
Probability 0.578675

LAMPIRAN D :
LAIN-LAIN

Kolerasi Pearson

Correlations

		RD	GR
RD	Pearson Correlation	1	.143
	Sig. (1-tailed)	.	.312
	N	14	14
GR	Pearson Correlation	.143	1
	Sig. (1-tailed)	.312	.
	N	14	14

Scatterplot

